



LAPORAN *HORIZON SCANNING*

MASA DEPAN UMKM DI INDONESIA

LAPORAN HORIZON SCANNING

**MASA DEPAN
UMKM
DI INDONESIA**

Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini sepenuhnya milik penulis dan tidak serta-merta mewakili pandangan Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk United Nations Global Pulse, lembaga donor, atau Negara-negara Anggota PBB. Pandangan penulis belum tentu didukung oleh mereka yang namanya dikutip atau disebutkan dalam ucapan terima kasih.

Tanggal publikasi | Desember 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	PENDORONG DAN SINYAL YANG MEMBENTUK MASA DEPAN UMKM DI INDONESIA	14	POTENSI LANGKAH SELANJUTNYA UNTUK STRATEGIC FORESIGHT	GLOSARIUM
4			30	40
RINGKASAN EKSEKUTIF	1 PERUBAHAN IKLIM:BERKEJARAN DENGAN WAKTU	16	PEMBELAJARAN UTAMA DARI KEGIATAN STRATEGIC FORESIGHT	FAKTOR PENDORONG SEKUNDER YANG TERPILIH
6			36	41
PENDAHULUAN	2 MENINGKATNYA KEMITRAAN INTERNASIONAL UNTUK EKONOMI BERKELANJUTAN	20	UNDANGAN UNTUK BERDIALOG TENTANG MASA DEPAN	UCAPAN TERIMA KASIH
	3 MUNCULNYA SEKTOR-SEKTOR YANG SEDANG BERKEMBANG DAN PERGESERAN PREFERENSI KONSUMEN	22	38	43
	4 TEKNOLOGI DAN BISNIS: CARA KERJA BARU	25		CATATAN AKHIR
	5 PEKERJAAN RENTAN DALAM GIG ECONOMY	28		44

KATA PENGANTAR



DR. IR. AHMAD DADING GUNADI, MA,

Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mempersiapkan Indonesia dalam menyambut dekade baru yang penuh ketidakpastian ini, kita perlu mengantisipasi banyak perkembangan baru dan perubahan radikal dalam dunia usaha dan masyarakat. Pandemi COVID-19 menunjukkan betapa cepat dan mendasarnya perubahan-perubahan yang telah dan mungkin terjadi. Perkembangan teknologi yang pesat dan ketidakstabilan ekonomi global akibat pandemi dan konflik geopolitik telah membuka mata kita terhadap urgensi untuk membantu UMKM dalam mengantisipasi, mencegah, dan mempersiapkan diri menghadapi risiko dan peluang di masa depan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM telah mencapai 65,4 juta dengan kontribusi terhadap PDB Indonesia senilai 9.580,76 triliun Rupiah pada 2021. Banyaknya UMKM di Indonesia tidak lepas dari tantangan ketidakpastian masa depan, dan mengingat UMKM adalah pendorong pertumbuhan Indonesia, penting untuk memikirkan masa depan mereka.

Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan UN Global Pulse (UNGP), khususnya Pulse Lab Jakarta (PLJ) dan Pulse Lab Finlandia (PLF), untuk menyediakan alat dan data guna mendukung proses pengambilan kebijakan untuk pengembangan UMKM di masa depan. Salah satu kegiatan dalam kerja sama ini adalah pemindaian horizon atau *horizon scanning* terhadap masa depan UMKM di

Indonesia. Kegiatan ini sejalan dengan agenda masa depan dan pandangan ke depan UN Global Pulse dalam mendorong para pembuat kebijakan untuk menstimulasi pemikiran ke depan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Our Common Agenda.

Melalui proses *horizon scanning*, kami mendeteksi potensi faktor-faktor pendorong dan sinyal yang muncul, yang kemungkinan dapat berdampak pada masa depan UMKM di Indonesia. Laporan *foresight* ini merupakan bagian penting dari proses pengembangan kebijakan untuk memastikan ekosistem UMKM yang dinamis, berkembang, dan responsif. Hasil dari proses *horizon scanning* akan memperkaya pandangan kita dan semakin membentuk masa depan UMKM Indonesia, yang nantinya akan dituangkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia 2025–2045.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua anggota tim atas dedikasi terbaik mereka dalam penyusunan laporan ini. Saya berharap ini dapat menjadi salah satu referensi utama kami dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia 2025–2045, dan akan mendorong rekan-rekan lain di Kementerian PPN/Bappenas untuk menggunakan metode berharga ini sebagai bagian dari proses perencanaan mereka.

KATA PENGANTAR

Di Indonesia, UMKM menyumbangkan 60% dari produk domestik bruto nasional, yang secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Peristiwa baru-baru ini, seperti pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik, ditambah lagi dengan perubahan iklim, telah berdampak buruk pada UMKM, yang membutuhkan dukungan dan intervensi pemerintah untuk meminimalkan dampak dari tantangan saat ini dan masa depan. Lebih dari Rp116 triliun (US\$7,5 miliar) dialokasikan dalam program pemulihan ekonomi nasional yang diluncurkan pada 2020. Mengingat kompleksitas yang kian meningkat dan ketidakpastian krisis alam dan buatan manusia, pengambil keputusan kebijakan perlu lebih siap untuk menerapkan langkah-langkah antisipatif yang secara efektif menyalurkan sumber daya untuk mendukung UMKM.

Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan UN Global Pulse melalui kemitraan analitis untuk memperkuat UMKM dan memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari kolaborasi tersebut, studi foresight dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut: seperti apa lanskap masa depan UMKM, dan apa pendorong utama yang mungkin membentuknya? Kegiatan horizon scanning ini mengidentifikasi pendorong dan sinyal yang membentuk masa depan UMKM di Indonesia. Proses ini memberi tim Kementerian PPN/Bappenas alat tambahan untuk merancang kebijakan yang akan membantu UMKM memanfaatkan peluang masa depan, memitigasi risiko, dan menjadi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan di masa depan.

Sebagai mitra analisis yang menggunakan pendekatan metode campuran, Pulse Lab Jakarta dengan senang hati mendukung penggunaan foresight dalam proses perencanaan pemerintah. Metodologi ini melengkapi instrumen perencanaan kuantitatif dan kualitatif yang ada untuk memberikan strategi perencanaan yang kuat. Kegiatan foresight dan horizon scanning tidak semata-mata bermanfaat untuk membantu tim Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan strategi pembangunan nasional, tetapi juga dalam membangun kapasitas pengambil kebijakan agar lebih adaptif dan antisipatif terhadap tantangan masa depan. Oleh karena itu, kami berharap kerja-kerja foresight akan berlanjut jauh setelah laporan ini terbit dan terus meluas ke unit lain di Kementerian PPN/Bappenas dan di berbagai kementerian di Indonesia.

Kemitraan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa komitmen tim Kementerian PPN/Bappenas, yang dipimpin oleh Pak Ahmad Dading Gunadi dari Direktorat Pengembangan UMKM dan Koperasi, serta tim pemindaian dari Pulse Lab Jakarta dan tim Pulse Lab Finlandia untuk bimbingan teknis mereka. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Australia atas dukungannya terhadap Pulse Lab Jakarta dan Pemerintah Finlandia atas dukungannya terhadap Pulse Lab Finlandia.

Kami berharap penelitian ini akan menghasilkan diskusi yang berkesinambungan di kalangan lembaga pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum seraya kami membayangkan masa depan UMKM di Indonesia, dan bagaimana kita semua dapat berkontribusi untuk kemakmuran mereka.



PETRARCA KARETJI

Kepala Pulse Lab Jakarta, UN Global Pulse

RINGKASAN EKSEKUTIF

MASA DEPAN UMKM DI INDONESIA: KONTEKS DAN TUJUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang terdiri dari lebih dari 65 juta badan usaha, 64,5% di antaranya adalah milik perempuan, mewakili lebih dari 60% PDB Indonesia.² Itu artinya, UMKM menyediakan lapangan kerja bagi 97% dari total angkatan kerja nasional—sekitar 117 juta pekerja. Inilah mengapa sektor UMKM sering dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia dan pendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. UMKM juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan bisnis Indonesia.

Di tengah-tengah perubahan pesat, krisis global, dan ketidakpastian yang tinggi, pemerintah perlu mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak terduga—terutama yang berkaitan dengan UMKM. Hal ini sangat penting bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), yang sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia (2025-2045). Ketika memikirkan masa depan UMKM, beberapa pertanyaan kunci yang perlu dibahas adalah:

PERTANYAAN KUNCI →

**Seperti apa lanskap masa depan
UMKM di Indonesia?**

**Apa isu-isu utama yang muncul
untuk sektor ini?**

**Apa yang berpotensi mengubah atau
mendisrupsi masa depan UMKM
seperti yang kita bayangkan saat ini?**

Untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, UN Global Pulse dan Kementerian PPN/Bappenas melakukan kegiatan *strategic foresight* tentang masa depan UMKM di Indonesia. Teknik inti yang digunakan adalah *horizon scanning*, yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari 12 pemindai (scanners) di Kementerian PPN/Bappenas dengan didukung UN Global Pulse. Tujuan khusus dari kegiatan ini adalah memahami perkembangan potensial apa saja yang dapat mempengaruhi masa depan UMKM, membangun kapasitas *foresight* melalui *learning-by-doing*, dan memperkaya pengembangan kebijakan dan strategi yang kuat.

PENDEKATAN “FORESIGHT”

Setelah pelatihan awal yang diikuti tim pemindai dari Kementerian PPN/ Bappenas dan UN Global Pulse, *horizon scanning* dilakukan dengan fokus pada tiga domain utama: politik dan hukum, sosial dan ekonomi, serta teknologi dan lanskap lingkungan. Pemindaian dan analisis dilakukan dengan menggunakan tiga teknik inti:

- *Desk research* berdasarkan tinjauan pustaka, pencarian internet, siaran pers, dan media sosial
- Wawancara dan survei dengan pakar terkait dan pemangku kepentingan lainnya
- Diskusi kelompok terarah (FGD) dan lokakarya untuk memvalidasi dan mengkaji wawasan yang dihasilkan

Hasil dari kegiatan horizon scanning adalah 112 sinyal utama yang diidentifikasi dari perubahan yang muncul dalam 40+ area tematik. Sinyal-sinyal ini kemudian dikelompokkan ke dalam 15 pendorong utama perubahan, yang kemudian diseleksi menjadi lima pendorong utama dan sepuluh pendorong sekunder. Pendorong atau driver ini kemudian didokumentasikan, bersama dengan ringkasan sinyal dasar yang paling relevan dan implikasinya di masa depan.

Pendorong-pendorong utama yang membentuk masa depan UMKM di Indonesia adalah:

1. **Perubahan iklim: berkejaran dengan waktu.**
Perubahan iklim mempengaruhi UMKM, terutama mereka yang bergantung pada ekosistem alam, seperti perikanan dan pertanian, dan pada sumber daya alam, seperti manufaktur. Sebagai dampak dari perubahan iklim, kekurangan sumber daya produksi dan peningkatan inflasi komoditas dapat mengakibatkan ketidakstabilan di pasar domestik dan lokal.
2. **Meningkatnya kemitraan internasional untuk ekonomi berkelanjutan.**
Partisipasi Indonesia dalam kemitraan ekonomi berkelanjutan kian meningkat, menciptakan peluang baru bagi UMKM untuk memperluas produksi dengan mengadopsi model bisnis yang lebih berkelanjutan.
3. **Munculnya sektor-sektor yang sedang berkembang dan pergeseran preferensi konsumen.**
Globalisasi dan teknologi

meningkatkan standar hidup dan usia. Ia mempengaruhi perilaku dan pilihan konsumen, sehingga menciptakan sektor, peluang ekonomi, dan jenis bisnis baru.

4. **Teknologi dan bisnis: cara kerja baru.**
Proses digitalisasi yang dipercepat COVID-19 telah membentuk ulang pekerjaan global. Terlepas dari manfaat yang diberikan teknologi canggih bagi UMKM, kesenjangan digital nyata dan memperburuk ketidaksetaraan sosial dan digital.
5. **Pekerjaan rentan dalam *gig economy*.**
Pergeseran model ketenagakerjaan mendorong kebangkitan *gig economy*, memberikan fleksibilitas bagi pekerja dan perusahaan. Namun, para pekerja di *gig economy* sering menghadapi kondisi kerja yang tak menentu, tunjangan yang terbatas, dan remunerasi yang rendah.



Kegiatan horizon scanning mengungkap pendorong dan sinyal utama yang membentuk masa depan UMKM Indonesia, serta implikasi masa depan yang dibawa oleh setiap pendorong. Selain itu, kegiatan ini mengungkap keterkaitan yang signifikan antara pendorong dan sinyal politik, sosial ekonomi, dan teknologi-lingkungan.

Selain lima pendorong utama, kami mengidentifikasi pendorong sekunder yang membentuk masa depan UMKM di Indonesia (daftar pendorong sekunder dalam lampiran 41-42). Misalnya, meningkatnya ketidakpastian geopolitik saat ini, pergeseran dinamika kekuatan global, dan meningkatnya ketegangan antara perekonomian adidaya—yang bisa meningkat di tahun-tahun mendatang. Pendorong sekunder ini diperkirakan dapat memperbesar tantangan dunia global di mana negara-negara menjadi saling berhubungan dan saling bergantung. Pergeseran lanskap ini dapat berdampak pada pendorong dan sinyal yang disajikan dalam laporan yang membentuk masa depan UMKM di Indonesia.

LANTAS, APA YANG BISA DILAKUKAN? LANGKAH-LANGKAH SELANJUTNYA YANG MUNGKIN DITEMPUH

Kegiatan *horizon scanning* adalah fase awal dari perjalanan *strategic foresight* dan dapat membantu mengasah kemampuan pembuat kebijakan dalam mengantisipasi tren dan tantangan di masa depan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, proses *horizon scanning* telah membantu kami memahami nilai tambah dari penggunaan *foresight* untuk menyusun perencanaan ke depan dan bagaimana proses ini dapat direplikasi di berbagai unit di Kementerian PPN/ Bappenas dan kementerian/lembaga lain di seluruh Indonesia.

Untuk mengembangkan hasil kegiatan *horizon scanning*, alat *foresight* tambahan dapat digunakan untuk menjadikan pendorong dan sinyal sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan mempertajam proses perencanaan kebijakan Kementerian PPN/Bappenas (lihat halaman 31).

Terakhir, untuk merentangkan dialog lebih luas tentang lanskap masa depan UMKM di Indonesia, kami merenungkan: Apa makna dan implikasi dari tren-tren yang membentuk masa depan UMKM Indonesia? Apa yang perlu kita perhatikan berdasarkan pendorong dan sinyal yang diidentifikasi?

Penjelasan lebih detail tentang pemikiran *foresight*, proses pemindaian, hasil, dan pembelajaran yang dipetik dari proyek ini, disajikan di bagian-bagian selanjutnya.

PENDAHULUAN

PERAN STRATEGIC FORESIGHT: MENGUBAH POLA PIKIR DAN MENDORONG PEMIKIRAN ANTISIPATIF



**Common
Agenda**

Kementerian PPN/Bappenas, dengan dukungan dari kantor United Nations Global Pulse di Jakarta dan Finlandia, memulai kegiatan pembelajaran *strategic foresight* untuk mengeksplorasi pengembangan proses kebijakan yang lebih antisipatif. UNGP telah

mendukung penerapan *strategic foresight*—di samping metode lain seperti ilmu data dan ilmu perilaku—untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, seperti yang dipromosikan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam Agenda Bersama Kita [Our Common Agenda](#). Dalam konteks Indonesia, proyek ini diletakkan dalam kerangka pengembangan kebijakan untuk meningkatkan peluang UMKM di masa depan.

Pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada UMKM di Indonesia kembali mengingatkan kita bahwa meneruskan cara-cara lama bukanlah pilihan yang tepat, termasuk cara-cara kita selama ini dalam mendukung UMKM untuk tumbuh dan lebih berkelanjutan. Krisis ini menyoroti perlunya secara proaktif mempersiapkan diri untuk mengantisipasi disrupsi di masa depan sebelum risiko itu terwujud, serta pentingnya membayangkan masa depan yang optimal bagi sektor ini untuk membantu menentukan dan meningkatkan upaya-upaya utama dalam berinovasi. Kita perlu mengadopsi pendekatan dan metode yang berbeda untuk mengembangkan kebijakan yang dapat mengantisipasi tidak hanya satu, melainkan beragam skenario yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Di sinilah peran *strategic foresight* menjadi berguna, karena pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengartikulasikan kebijakan yang benar-benar berwawasan ke depan dan tahan terhadap guncangan di masa depan.



Pertanyaan dan tujuan pembelajaran yang lebih luas untuk kolaborasi ini adalah:

**PERTANYAAN
KUNCI** →

Seperti apa lanskap UMKM di Indonesia pada masa yang akan datang?

Apa saja isu-isu utama yang muncul untuk sektor ini?

Apa saja yang berpotensi mengubah atau mendisrupsi masa depan seperti yang kita bayangkan saat ini?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, UN Global Pulse, bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang) dan Direktorat Pengembangan UMKM dan Koperasi di Kementerian PPN/Bappenas, mengadakan kegiatan *piloting* atau percontohan *horizon scanning* yang berfokus pada masa depan UMKM di Indonesia. Proses, hasil, dan tujuan masa depan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen ini.

Secara khusus, kegiatan piloting ini bertujuan untuk:

TUJUAN →

memahami perkembangan potensial apa yang dapat mempengaruhi masa depan UMKM

membangun kapasitas *foresight* melalui pembelajaran secara praktis atau *learning-by-doing*

menjadi dasar informasi untuk pengembangan kebijakan dan strategi yang kuat

Tujuan jangka panjang dari kolaborasi ini adalah mengeksplorasi dan memahami bagaimana kita dapat menggunakan alat dan pendekatan *foresight* lainnya, selain *horizon scanning*, untuk mendukung proses pembuatan kebijakan Indonesia. Hal ini dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan antisipatif oleh pembuat kebijakan, menjadi landasan informasi untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN), berkontribusi pada Visi Indonesia 2045³ (di mana pengembangan UMKM memainkan peran kunci), dan mendukung realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.⁴

KONSEP UTAMA STRATEGIC FORESIGHT DAN PROSES HORIZON SCANNING

Strategic Foresight adalah pendekatan untuk berpikir dan bertindak secara sistematis, antisipatif, dan jangka panjang. Selama beberapa dekade terakhir, *strategic foresight* menekankan pentingnya mempertimbangkan ketidakpastian tentang masa depan, dan perlunya mengasah keterampilan antisipatif. Tujuan utama *strategic foresight* bukanlah membuat prediksi yang sempurna, melainkan:

- mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan;
- melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui dialog tentang masa depan sebagai wadah untuk mengasah dan memanfaatkan kecerdasan kolektif; dan
- menjalankan kegiatan dan kebijakan untuk mendukung perkembangan positif dan pada saat yang sama memitigasi kemungkinan negatif.

Strategic foresight adalah pendekatan yang membantu pembuat kebijakan bertransisi dari mode yang utamanya reaktif menuju mode proaktif dan antisipatif. Pendekatan ini menumbuhkan kemampuan kita untuk

menyikapi masa depan sebagai sesuatu yang dapat kita bentuk dan pengaruhi, dan bukan sesuatu yang tidak dapat diubah.

Proses *strategic foresight* dimulai dengan mengeksplorasi isu-isu baru yang muncul yang dapat mengubah masa depan, dan *horizon scanning* sering kali menjadi teknik inti pada fase pertama ini. *Horizon scanning* adalah proses mengidentifikasi tren-tren dan sinyal-sinyal perubahan yang baru muncul yang dapat membentuk masa depan pada suatu isu tertentu. Proses pengumpulan bukti yang terstruktur dan kualitatif, yang mendorong pembuat kebijakan untuk melihat melampaui isu-isu yang dihadapi UMKM saat ini, memberikan kerangka kerja untuk melakukan deteksi dini dan mengkaji tren-tren dan perkembangan utama pada jangka panjang.

Proses pemindaian atau *scanning* diterapkan menggunakan kerangka kerja PESTLE (politik, ekonomi, sosio-demografis, teknologi, hukum, dan lingkungan) untuk menangkap dan menganalisis sinyal perubahan serta memastikan bidang cakupan yang luas.

KERANGKA ANALISIS PESTLE



PROSES HORIZON SCANNING →

Tim khusus yang terdiri dari dua belas orang scanner atau pemindai dari Kementerian PPN/Bappenas dan UNGP melakukan horizon scanning, dengan difasilitasi para ahli *strategic foresight*. Berikut merupakan langkah-langkah yang diambil selama proses *horizon scanning*:



METODE-METODE YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES HORIZON SCANNING

Dalam kegiatan *horizon scanning*, kami menggunakan tiga metode utama:

APA**DESK RESEARCH****BAGAIMANA**

Pemindaian manual terhadap sumber-sumber yang relevan: situs web, blog, podcast, publikasi terbaru dari berbagai lembaga dan organisasi, publikasi khusus, dan umpan media sosial (divalidasi) dari para ahli

MENGAPA

Untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda

KAPAN

#2 Fase pemindaian dan pengumpulan data

APA**WAWANCARA****BAGAIMANA**

Wawancara dengan para ahli dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan setelah terlebih dahulu memetakan para pemangku kepentingan

MENGAPA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan yang muncul dan kemungkinan konsekuensi sinyal yang ditangkap dalam konteks UMKM

KAPAN

#2 Fase pemindaian dan pengumpulan data

APA**KONSULTASI****BAGAIMANA**

Diskusi kelompok terarah (FGD) dengan praktisi dan pemuda, lokakarya, dan sesi *strategic foresight* partisipatif

MENGAPA

Untuk memvalidasi hasil pemindaian, mengurangi bias dalam pemikiran masa depan kita, dan mengidentifikasi area-area potensial yang tidak terlihat

KAPAN

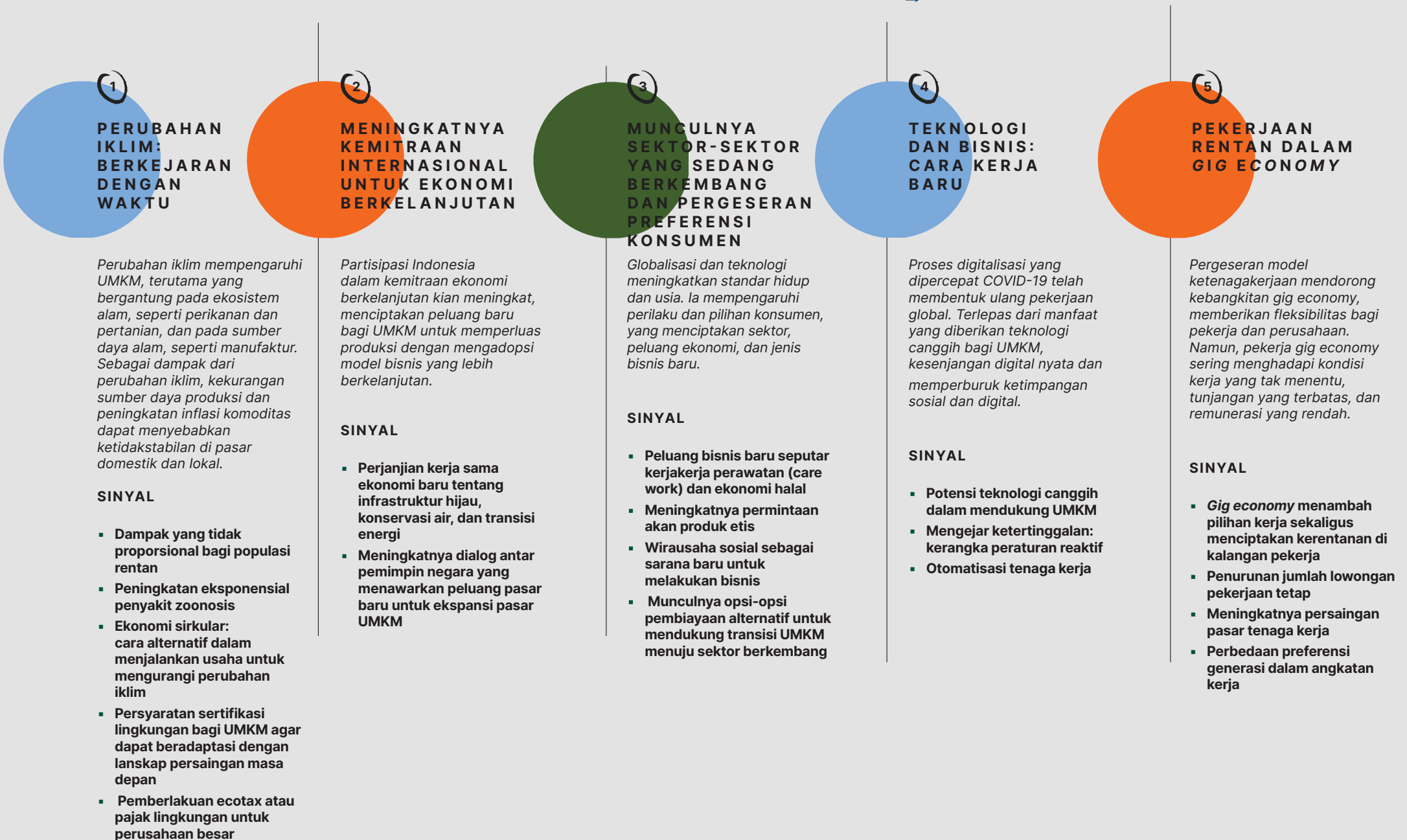
#4 Fase *sensemaking*

PENDORONG DAN SINYAL YANG MEMBENTUK MASA DEPAN UMKM DI INDONESIA



Bagian berikut meninjau pendorong dan sinyal perubahan utama yang berpotensi membentuk masa depan UMKM Indonesia, serta implikasi yang kelak dapat muncul dari masing-masing pendorong. Temuan ini dapat membantu berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pembuat kebijakan hingga usaha individu, memahami lebih dalam apa yang terbentang di hari esok dan merencanakan masa depan UMKM di Indonesia.

PENDORONG DAN SINYAL YANG MEMBENTUK MASA DEPAN UMKM DI INDONESIA



1 PERUBAHAN IKLIM: BERKEJARAN DENGAN WAKTU

Perubahan iklim memicu berbagai efek buruk di planet ini, membawa risiko yang mengancam semua spesies, termasuk manusia. Kenaikan tingkat pengasaman laut memiliki dampak disruptif terhadap ekosistem laut, mempengaruhi aktivitas dan komunitas nelayan. Perubahan iklim pun sudah mempengaruhi siklus air alami di Indonesia. Kenaikan curah hujan menyebabkan banjir, sementara pada saat yang sama, penurunan curah hujan juga menyebabkan kekeringan.⁵ Perubahan iklim akan membawa dampak besar bagi UMKM, terutama UMKM yang sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem alam, seperti perikanan dan pertanian, serta usaha-usaha yang sangat bergantung pada sumber daya alam, seperti produksi manufaktur.

Dampak perubahan iklim dapat menyebabkan kekurangan bahan baku produksi dan dapat menimbulkan peningkatan komoditas inflasi, menciptakan ketidakstabilan di pasar domestik dan lokal.

Kebutuhan akan penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan menjadi tantangan yang semakin mendesak. Secara khusus, meningkatnya kebutuhan akan kegiatan ekonomi sirkular untuk mengatasi tantangan-tantangan ini membuka peluang untuk terciptanya pasar dan spesialisasi (niche) baru, sehingga menjadi titik masuk baru bagi UMKM Indonesia untuk berkembang. Hal ini dapat membuka peluang baru bagi UMKM sekaligus menjadi tantangan dalam menjalankan usaha, yang berpotensi meningkatkan ketimpangan yang ada.





SINYAL-SINYAL YANG MENDASARI

DAMPAK YANG TIDAK PROPORSIONAL TERHADAP PENDUDUK RENTAN

Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat adat dan penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil dan terpencil di Indonesia.⁶ Mata pencaharian penduduk ini bergantung pada ekosistem yang rapuh, tetapi mereka tidak memiliki akses ke dukungan dan teknologi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dampak perubahan iklim juga dapat meluas ke daerah perkotaan, mengancam kelompok masyarakat perkotaan yang paling rentan. Selain itu, perubahan iklim dapat menyebabkan arus migrasi.⁷ Sering kali, daerah tujuan migrasi tidak siap untuk menerima dan menampung pendatang yang masuk, berpotensi menciptakan tantangan dalam menyediakan layanan dan infrastruktur dasar, menimbulkan ketegangan antara penduduk dengan pengungsi iklim, memicu persaingan untuk peluang mata pencaharian, dan berdampak pada ekosistem UMKM..

PENINGKATAN EKSPONENSIAL PENYAKIT ZONOSIS

Perubahan iklim dapat meningkatkan kemungkinan penyebaran penyakit zoonosis dan pandemi global akibat perubahan habitat satwa liar dan peningkatan interaksi spesies-spesies yang mampu bertukar patogen. Pada saat yang sama, interaksi manusia secara global meningkatkan kemungkinan terjadinya wabah di masa depan.⁸ Seperti yang kita lihat selama pandemi COVID-19, UMKM lebih rentan terpengaruh oleh guncangan negatif akibat pandemi terhadap rantai pasokan, pasokan tenaga kerja, dan permintaan barang dan jasa, jika dibandingkan dengan usaha-usaha besar. Namun, karena UMKM beragam, tingkat keparahan dampak yang disebabkan oleh pandemi di masa depan juga dapat bervariasi.

EKONOMI Sirkular: Cara Alternatif dalam Menjalankan Usaha untuk Mengurangi Perubahan Iklim

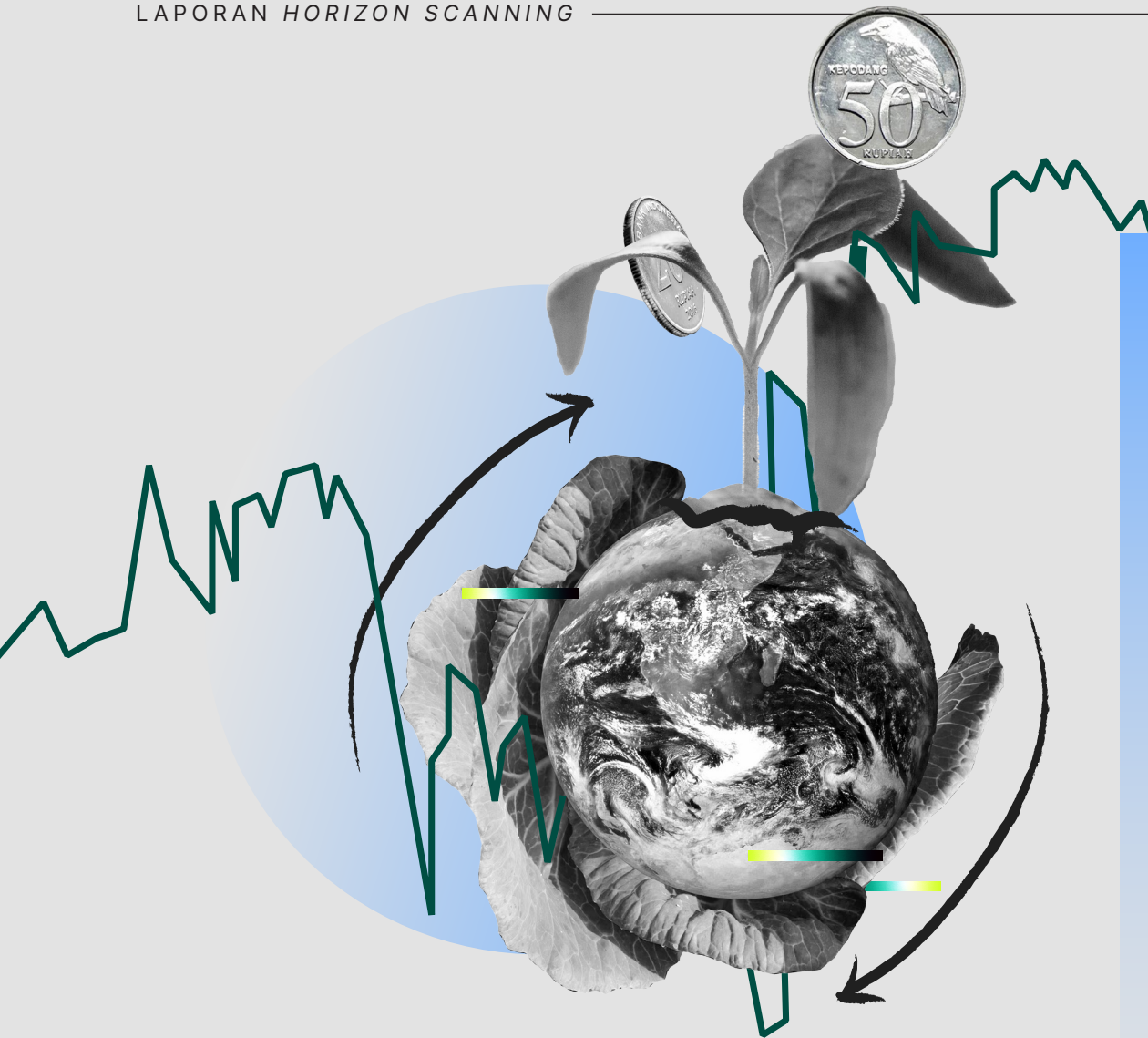
Degradasi lingkungan, meningkatnya ketimpangan, dan pertumbuhan teknologi telah mendorong keinginan global untuk menerapkan cara-cara alternatif yang lebih berkelanjutan dalam menjalankan usaha. Ekonomi sirkular merupakan salah satu jalan penting untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim, khususnya yang terkait dengan UMKM. Ekonomi sirkular adalah model produksi dan konsumsi yang mengedepankan penggunaan kembali, perbaikan, pembaruan, dan daur ulang sumber daya dan barang yang ada selama mungkin.⁹ Peluang ekonomi yang besar dapat dihasilkan di seluruh rantai pasokan industri melalui fokus pada konsep pengurangan, regenerasi, dan restorasi—sebagaimana tercermin dalam meningkatnya permintaan akan limbah dan inovasi daur ulang plastik.

Persyaratan Sertifikasi Lingkungan bagi UMKM agar dapat Beradaptasi dengan Lanskap Persaingan Masa Depan

Wacana yang muncul tentang ekonomi hijau menandakan perubahan cara UMKM menjalankan usaha mereka dalam waktu dekat. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Environmental Program mendefinisikan ekonomi hijau sebagai ekonomi “yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, dan pada saat yang sama mengurangi secara signifikan risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis.”¹⁰ Dengan pergeseran ke arah ekonomi hijau dan meningkatnya permintaan akan produk berkelanjutan, UMKM akan dituntut untuk mematuhi beberapa bentuk sertifikasi lingkungan, dimulai dengan UMKM yang bekerja di industri ekstraktif dan pertanian. Meskipun munculnya sertifikasi hukum merupakan sinyal positif untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis, segmen UMKM tertentu mungkin menghadapi tantangan dalam memperoleh sertifikasi.

Pemberlakuan Ecotax atau Pajak Lingkungan terhadap Perusahaan-Perusahaan Besar

Perusahaan besar yang mengandalkan energi berbasis batu bara akan segera dikenakan pajak oleh pemerintah.¹¹ Sejauh ini, pajak lingkungan telah dikenakan pada industri yang paling banyak menghasilkan karbon, meski sempat tertunda karena beberapa faktor, seperti pandemi COVID-19 dan harga energi yang tinggi. Ke depannya, tren tersebut bisa meluas ke badan usaha lain di tanah air, termasuk UMKM. Pada level mikro, bentuk lain dari ecotax adalah ketentuan bahwa konsumen harus membayar kantong plastik di supermarket jika diperlukan.¹² Meski memiliki potensi untuk meningkatkan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan, ecotax juga berpotensi memperparah ketimpangan kekayaan dengan mengalihkan biaya kepada konsumen yang berpenghasilan rendah dan usaha mikro, dan bukan kepada perusahaan-perusahaan besar.¹³



IMPLIKASI DI MASA DEPAN

Membentuk kembali sistem kesiapsiagaan krisis antisipatif untuk krisis iklim di masa depan

Mengkalibrasi ulang dukungan yang tersedia bagi UMKM untuk merespons guncangan di masa depan dan memperkuat ketahanan mereka terhadap dampak terkait perubahan iklim menjadi sangat penting. Belajar dari pengalaman respons COVID-19—di mana pemerintah menawarkan segudang paket bantuan sosial kepada UMKM—akan membantu merancang sistem respons krisis antisipatif yang lebih komprehensif untuk mengurangi potensi dampak perubahan iklim dan mendasari diskusi kebijakan. Sistem respons krisis yang lebih antisipatif memerlukan pengembangan berbagai skenario krisis yang mungkin terjadi bersama dengan respons yang tepat, mengkonfigurasi ulang sistem peringatan dini, menyediakan opsi pembiayaan yang fleksibel, dan melibatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak perubahan iklim.¹⁴

Mengkonfigurasi ulang dukungan untuk usaha mikro dan kecil untuk merangkul praktik bisnis yang ramah lingkungan

Badan usaha dari semua ukuran punya peran penting dalam memerangi perubahan iklim. Meski usaha mikro dan kecil bersedia menyesuaikan praktik bisnis mereka demi mengoperasikan usaha secara lebih ramah lingkungan, mereka sering kekurangan pengetahuan, kapasitas, dan anggaran untuk melakukannya. Sertifikasi untuk bisnis, terutama untuk industri ekstraktif dan pertanian, dapat menjadi solusi, meskipun sebagian besar sertifikasi saat ini dibangun untuk bisnis menengah hingga besar. Untuk mendorong adopsi operasi usaha yang ramah lingkungan, pendekatan yang lebih layak seperti menawarkan alat, informasi, dan insentif keuangan untuk praktik bisnis yang lebih hijau, dapat menjadi alternatif, di samping upaya-upaya lain dalam menjalin kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan perusahaan-perusahaan besar.

2 MENINGKATNYA KEMITRAAN INTERNASIONAL UNTUK EKONOMI BERKELANJUTAN

Seiring berbagai upaya global untuk memerangi perubahan iklim, Indonesia menjalin kemitraan dengan berbagai negara demi mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kemitraan-kemitraan baru ini tidak hanya mengarahkan pertumbuhan Indonesia menuju perekonomian yang lebih hijau, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi UMKM untuk memperluas penawaran mereka dengan membuat model usaha yang lebih berkelanjutan.



SINYAL YANG MENDASARI

PERJANJIAN KERJA SAMA EKONOMI BARU TENTANG INFRASTRUKTUR HIJAU, KONSERVASI AIR, DAN TRANSISI ENERGI

Meningkatnya kesadaran global akan perlunya model ekonomi berkelanjutan baru, mendorong wacana ekonomi hijau dan transisi menuju kemitraan ekonomi bilateral yang lebih berkelanjutan. Ambisi Indonesia untuk menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045,¹⁷ mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan baru dan perjanjian kerja sama internasional untuk membangun model transformasi ekonomi yang lebih hijau. Perjanjian tersebut mencakup pengurangan emisi, infrastruktur hijau, transisi energi bersih, dan konservasi air. Misalnya, Indonesia dan Kanada baru-baru ini sepakat untuk mempromosikan kerja sama ekonomi dalam transisi energi yang lebih bersih.¹⁸

MENINGKATNYA DIALOG ANTAR PEMIMPIN NEGARA MENAWARKAN PELUANG PASAR BARU BAGI EKSPANSI PASAR UMKM

Dialog atau forum antar pemerintah berpotensi membuka jalan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Sejak menjadi tuan rumah G20 dan forum lainnya, pemerintah Indonesia telah meningkatkan advokasi dan mempromosikan ekspor produk UMKM lokal ke daerah lain. Belakangan ini, diskusi antara perwakilan Korea Selatan dan pemerintah, pemerintah Indonesia, dan UMKM berfokus pada peningkatan ekspor produk makanan dan minuman UMKM ke Korea Selatan.¹⁵ Hal ini menandakan bahwa semakin banyak UMKM di sektor ini yang akan memiliki kesempatan untuk memasuki pasar Korea Selatan dan menempa jalan untuk ekspansi pasar yang lebih besar ke Asia Timur. Bergerak melampaui Asia Timur, UMKM Indonesia juga bersiap memasuki pasar Timur Tengah, memanfaatkan Dubai sebagai pintu masuk ke negara-negara lain di kawasan ini untuk mengeksport produk makanan dan minuman.¹⁶

IMPLIKASI DI MASA DEPAN

Membayangkan ekosistem UMKM yang sesuai dengan masa depan dalam meningkatkan peluang global

Meningkatnya tren perjanjian kerja sama ekonomi global dan berkelanjutan dapat membuka jalan bagi pertumbuhan UMKM dan memperluas daya tawar mereka. Untuk mendukung UMKM yang berorientasi ekspor, pembuat kebijakan perlu memastikan ekosistem yang sesuai dengan masa depan dengan menumbuhkan kesadaran pasar, menciptakan mekanisme dukungan bisnis yang efektif, melibatkan sektor swasta, dan merampingkan prosedur peraturan dan administrasi. Memfasilitasi usaha mikro dan kecil untuk berpartisipasi dalam proses dan memasuki pasar baru akan membutuhkan dukungan terutama saat mereka beralih dari melayani pasar lokal menjadi bersaing di pasar dunia dengan beragam bahasa, budaya, dan proses bisnis.

Namun, penting untuk dicatat bahwa risiko yang ada dan kontestasi yang belum terselesaikan di antara negara-negara anggota dalam perjanjian kerja sama ekonomi dapat menghambat perluasan prospek ekonomi dengan negara lain. Kerja sama tersebut bisa berdampak negatif jika Indonesia hanya dipandang sebagai pasar barang asing. Untuk memastikan bahwa UMKM Indonesia juga memiliki saham di pasar ekspor, implementasi kebijakan perdagangan, industri, makroekonomi, dan UMKM yang kuat akan diperlukan.

3

MUNCULNYA SEKTOR-SEKTOR YANG SEDANG BERKEMBANG DAN PERGESERAN PREFERENSI KONSUMEN

Globalisasi dan kemajuan teknologi memiliki kemampuan untuk mengubah masyarakat, mempromosikan standar hidup yang lebih tinggi serta usia yang lebih panjang. Selain itu, globalisasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi keputusan dan perilaku konsumen dengan mengubah persepsi individu. Misalnya, permintaan atas pekerjaan perawatan (*care work*) dan ekonomi halal telah meningkat, dan semakin banyak konsumen yang akan

beralih ke produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di masa depan. Transisi ini memungkinkan pembentukan sektor baru, yang disertai lahirnya peluang ekonomi dan jenis-jenis usaha baru. Dengan dukungan yang tepat, semakin banyak UMKM Indonesia yang dapat memanfaatkan peluang ini dengan menyediakan layanan dan produk yang memenuhi kebutuhan individu, usaha, dan pemerintah di masa mendatang.



SINYAL YANG MENDASARI

PELUANG BISNIS BARU SEPUTAR KERJA-KERJA PERAWATAN (CARE WORK) DAN EKONOMI HALAL

Seiring dengan tren global, penduduk Indonesia bertambah usia dan menua. Susenas 2019 melaporkan bahwa jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas di Indonesia mencapai 25,7 juta jiwa atau sekitar 9,6% dari total penduduk.¹⁹ Selain itu, penelitian Forum Ekonomi Dunia tentang pekerjaan masa depan memperkirakan bahwa industri perawatan (care work) akan menyumbang hampir 40% dari seluruh kemungkinan pekerjaan yang diharapkan dalam profesi baru antara 2020 dan 2023.²⁰

Bidang lain yang muncul adalah ekonomi halal. Pergeseran sikap terhadap barang halal dari produk bersertifikat ke pilihan gaya hidup, telah mendorong pertumbuhan industri dengan 1,9 miliar konsumen Muslim menghabiskan \$2 triliun pada 2021.²¹ Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, suatu hari nanti bisa menjadi penyedia layanan utama, menjadi produsen dan konsumen dalam ekonomi halal.

MENINGKATNYA PERMINTAAN AKAN PRODUK ETIS

Tren global menunjukkan beberapa segmen konsumen mulai menekankan kualitas daripada biaya karena standar hidup yang meningkat. Ada pula fokus global yang berkembang tentang cara menjadi konsumen yang lebih baik, dengan memilih produk-produk yang lebih etis dan diproduksi secara berkelanjutan—sebagaimana dibuktikan oleh tekanan global untuk industri mode yang lebih berkelanjutan.²² Ketersediaan sumber daya berkelanjutan dan tenaga kerja terampil menciptakan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam gerakan produksi yang etis dan berkelanjutan, dan menghasilkan peluang lebih lanjut bagi UMKM.

WIRAUSAHA SOSIAL SEBAGAI SARANA BARU UNTUK MELAKUKAN USAHA

British Council mendefinisikan wirausaha sosial sebagai “bisnis yang tujuan utamanya adalah mengatasi tantangan sosial atau lingkungan daripada [semata-mata] menciptakan keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham.”²³ Wirausaha sosial menjadi salah satu jalan bagi UMKM untuk mengatasi dan berkontribusi dalam memitigasi tantangan lingkungan dan sosial di Indonesia. Baru-baru ini ia mendapatkan dukungan di kalangan pemuda Indonesia dan dipandang lebih inklusif dari segi pekerjaan dan pengembangan pekerjaan, dengan perempuan membentuk 69% dari tenaga kerja wirausaha sosial yang disurvei.²⁴

MUNCULNYA OPSI-OPSI PEMBIAYAAN ALTERNATIF UNTUK MENDUKUNG TRANSISI UMKM MENUJU SEKTOR BERKEMBANG

Sebagian besar UMKM menghadapi hambatan birokrasi dalam mengakses opsi pembiayaan, yang menghambat akses mereka ke sektor-sektor yang sedang berkembang dan peluang usaha baru.²⁵ Akibatnya, perusahaan dengan sumber daya yang lebih baik memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mengakses sumber keuangan untuk memasuki area baru di masa depan. Blended finance atau pembiayaan campuran, yang didefinisikan oleh OECD sebagai “penggunaan strategis pembiayaan pembangunan untuk mobilisasi keuangan tambahan menuju pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang,²⁶ kian diminati sebagai opsi pembiayaan alternatif bagi UMKM yang bertransisi menuju sektor-sektor berkembang. Model ini, yang menggabungkan pembiayaan sektor swasta dan dana filantropi dan donor, dimaksudkan untuk mengurangi risiko investasi.



IMPLIKASI DI MASA DEPAN

Mempersiapkan UMKM untuk masuk ke sektor berkembang (*emerging*)

Memfasilitasi masuknya UMKM ke sektor-sektor yang sedang berkembang bukanlah upaya yang mudah mengingat sebagian besar usaha tidak terbiasa dengan jalur ini. Sering kali, perusahaan dihadapkan dengan biaya-biaya di muka yang signifikan sehingga terpaksa memasang harga produk dan layanan yang lebih tinggi dan, sebagai akibatnya, memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kecil. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa perusahaan menengah dan besar jauh lebih mampu menjajal sektor-sektor yang sedang berkembang karena mereka memiliki sumber daya yang diperlukan.

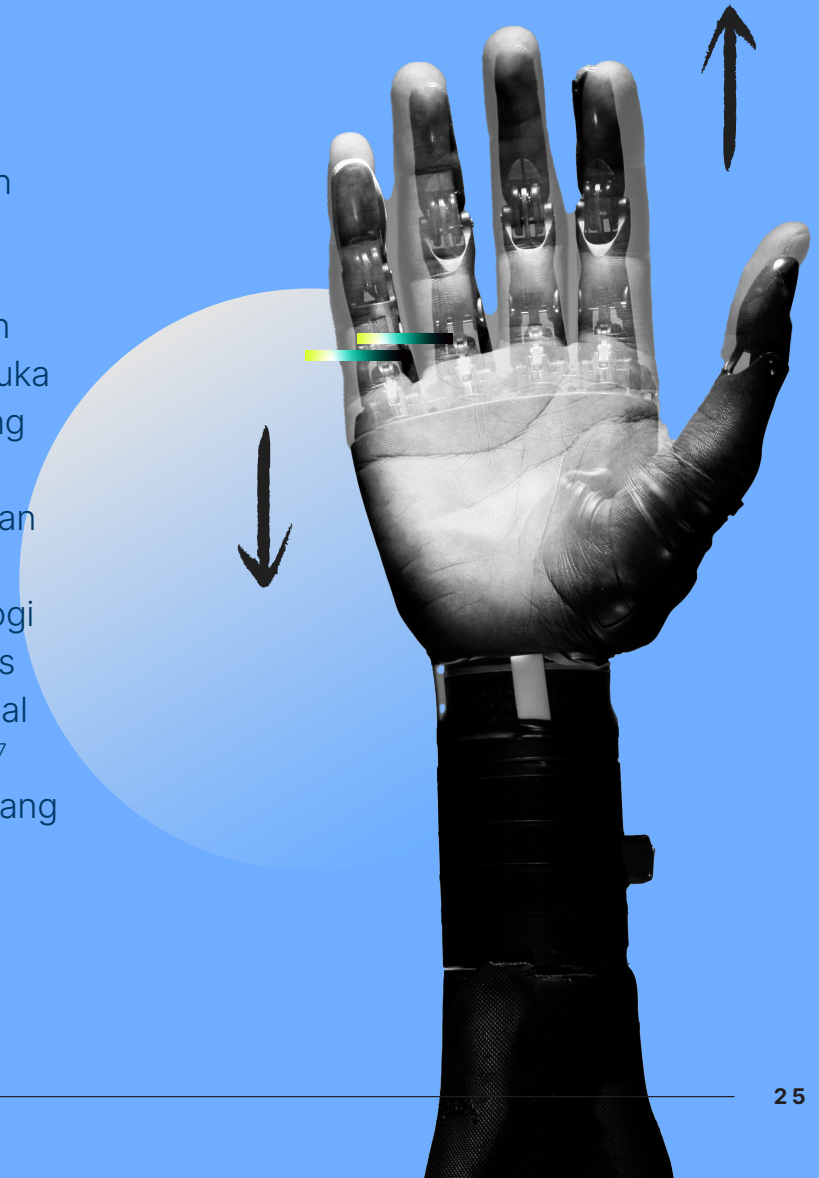
Walaupun insentif banyak digunakan untuk membantu usaha bertransisi ke sektor yang sedang berkembang, efektivitasnya perlu dinilai dengan cermat karena akan berbeda tergantung tiap-tiap sektor dan ukuran usaha. Selain itu, solusi pembiayaan alternatif, seperti *blended finance*, perlu dipertimbangkan karena dapat sangat menguntungkan UMKM yang memasuki sektor baru.

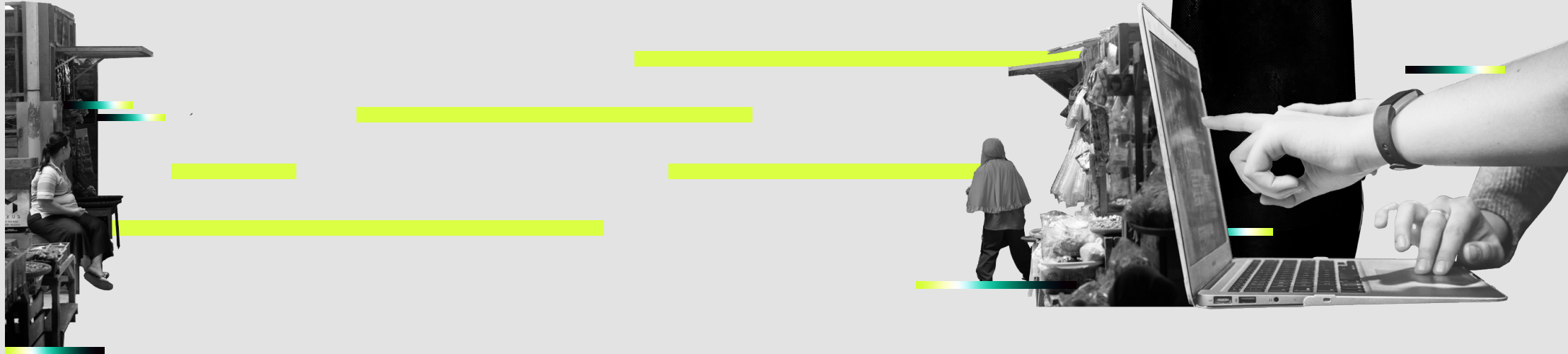
Seiring pertumbuhan sektor-sektor yang sedang berkembang, muncul kebutuhan bagi UMKM dan pekerjanya untuk memperoleh keterampilan baru. Pertumbuhan industri baru berpotensi menguntungkan bagi kaum muda, yang dapat memanfaatkan peluang potensial sambil mengasah kemampuan penting selama tahun-tahun akademik formatif mereka. Pemerintah akan memainkan peran penting sebagai fasilitator proses kapasitas generasi berikutnya, melalui investasi awal dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan teknis untuk mempersiapkan permintaan pasar yang terus berkembang.

4 TEKNOLOGI DAN BISNIS: CARA KERJA BARU

Transformasi teknologi dan otomatisasi akan menciptakan perubahan model bisnis dan cara kerja baru bagi UMKM. Proses digitalisasi, yang dipercepat oleh COVID-19, telah mengubah cara manusia bekerja di seluruh dunia. Di Indonesia, UMKM sudah mulai memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendorong usaha mereka, meningkatkan jangkauan mereka di luar pasar lokal. Kecerdasan Buatan (AI) dan *blockchain* merupakan contoh teknologi disruptif yang dapat

digunakan untuk menciptakan dunia virtual digital sehingga orang dapat menjalankan usaha dan menyelenggarakan kegiatan sosial. Hal ini membuka peluang baru bagi UMKM yang mampu beradaptasi dengan lingkungan digital baru ini. Akan tetapi, terlepas dari manfaat yang menjanjikan dari teknologi canggih kepada UMKM, akses yang tidak merata, juga dikenal sebagai kesenjangan digital,²⁷ memperburuk ketimpangan yang ada.





SINYAL YANG MENDASARI

POTENSI TEKNOLOGI CANGGIH DALAM Mendukung UMKM

Teknologi canggih, seperti AI, *blockchain*, dan *metaverse*, memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan usaha mereka. Misalnya, penggunaan aplikasi digital dan program perangkat lunak dapat membantu mengoptimalkan UMKM dalam menjalankan usahanya dengan memperluas jangkauan perusahaan di pasar yang berbeda dan mendukung operasional administrasi internal. Meskipun potensi penuh dari teknologi ini hanya dapat dimanfaatkan di masa depan, dampaknya akan sangat membentuk bagaimana UMKM beroperasi.

MENGEJAR KETERTINGGALAN: KERANGKA PERATURAN REAKTIF

Percepatan digitalisasi UMKM telah menjadi bagian dari agenda pemerintah. Namun, laju digitalisasi tidak selalu dibarengi dengan regulasi yang mengaturnya,²⁸ yang dapat mengakibatkan konsekuensi negatif bagi UMKM dan konsumen yang memanfaatkan teknologi tersebut.²⁹ Walaupun ada peraturan yang berlaku,³⁰ ia cenderung tumpang tindih dan membutuhkan penyesuaian untuk mencapai hasil terbaik. Namun, penerbitan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia baru-baru ini membawa harapan baru untuk perlindungan yang lebih baik di era teknologi yang berubah dengan cepat.³¹

OTOMATISASI TENAGA KERJA

Kelak, otomatisasi akan menciptakan peluang baru; tetapi, ia juga akan menghilangkan banyak pekerjaan yang ada dan berdampak pada sebagian besar tenaga kerja secara keseluruhan.³² Untuk menghadapi perubahan ini, UMKM perlu dipersiapkan dan akan membutuhkan dukungan untuk menyesuaikan strategi mereka.

IMPLIKASI DI MASA DEPAN

Menjembatani kesenjangan digital

Teknologi telah menjadi pendukung atau *enabler* bagi UMKM dalam menjalankan usahanya. Namun, kesenjangan digital adalah fenomena nyata. Di Indonesia, hampir setengah dari populasi orang dewasa masih kekurangan akses ke konektivitas teknologi, dan pada saat yang sama, kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan belum sepenuhnya teratasi.³³ Selain itu, menerapkan teknologi baru akan memerlukan investasi dalam pengembangan perangkat keras dan pengetahuan. Hal ini dapat mempersulit usaha mikro untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan sehubungan dengan perusahaan yang lebih besar.

Masyarakat mungkin menyadari peningkatan tajam dalam angka pengangguran di kalangan individu yang tidak memiliki keterampilan digital, dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan tersebut akan semakin memperlebar kesenjangan. Akibatnya, kesenjangan digital dapat memperparah kesenjangan sosial dan teknologi yang ada. Untuk menangkal efek ini, dukungan perlu diberikan pada kebijakan sosial dan pengangguran bagi mereka yang tidak dapat bersaing dalam ekonomi digital. Yang terpenting, dukungan perlu dirancang untuk melayani kelompok yang paling rentan.

Komitmen Layanan Kewajiban Pelayanan Universal atau KPU (Universal Service Obligation – USO) adalah upaya berkelanjutan pemerintah untuk memberikan infrastruktur dasar dan pelatihan literasi digital kepada masyarakat di daerah pedesaan Indonesia.³⁴ Inisiatif ini bertujuan memastikan UMKM dapat berpartisipasi dalam

ekonomi digital, namun tantangan untuk mengatasi kesenjangan digital di Indonesia memerlukan lebih dari sekadar pemerataan infrastruktur di wilayah terluar. Pekerja juga perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan digitalnya sehingga dapat memperkuat kemampuan dasar tenaga kerjanya.

Mengedepankan perlindungan konsumen dan memungkinkan pengawasan publik dalam menghadapi kemajuan teknologi

Terobosan teknologi menghasilkan perubahan radikal dalam lanskap kebijakan saat ini, yang menimbulkan tantangan besar bagi pembuat kebijakan yang berupaya menemukan keseimbangan antara mendorong inovasi, melindungi konsumen, memastikan persaingan yang adil di kalangan UMKM dan teknologi besar, dan mengatasi potensi konsekuensi disrupsi yang tidak diinginkan.

Praktik-praktik yang tidak transparan oleh perusahaan teknologi adalah salah satu masalah utama seputar kemajuan teknologi.³⁵ Memahami dampak negatif teknologi adalah langkah pertama yang diperlukan supaya dapat mengatur teknologi secara efektif. Selain itu, memastikan bahwa teknologi baru melayani kebaikan bersama membutuhkan *toolbox* solusi yang beragam, tidak hanya tindakan antimonopoli dan peraturan pro-persaingan, tetapi juga perlindungan privasi dan penggunaan data, peningkatan standar konten, dan pengawasan publik. Dengan memperluas keterlibatan organisasi akar rumput, akademisi, dan kelompok advokasi, kita dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi yang cepat melayani kebaikan bersama.

5

PEKERJAAN RENTAN DALAM GIG ECONOMY

Menurut Departemen Usaha, Energi & Strategi Industri Pemerintah Inggris, *gig economy* “melibatkan pertukaran tenaga kerja dengan uang antara individu atau perusahaan melalui platform digital yang secara aktif memfasilitasi pencocokan antara penyedia dan pelanggan, dalam jangka pendek dan pembayaran berdasarkan tugas.”³⁶ Pergeseran model ketenagakerjaan mendorong pertumbuhan generasi baru pekerja yang beroperasi di *gig economy*, yang bekerja

untuk banyak pemberi kerja secara lepas. Bagi UMKM, *gig economy* menawarkan akses ke kumpulan pekerja dan peningkatan fleksibilitas terkait dengan tenaga kerja kontrak untuk mendukung bisnis mereka. Namun, kelemahannya adalah bahwa bahkan pekerja dengan tingkat keahlian tinggi pun rentan dan dapat lolos dari celah-celah sistem jaminan sosial konvensional, yang tidak memiliki mekanisme untuk mengakomodasi jenis pekerja baru ini.³⁷



SINYAL YANG MENDASARI

GIG ECONOMY MENAMBAH PILIHAN KERJA SEKALIGUS MENCIPTAKAN KERENTANAN BAGI PARA PEKERJA

Dalam *gig economy*, pekerja terhubung dengan klien melalui *platform* digital untuk menyediakan layanan jangka pendek atau berbagi aset. Beberapa contoh *gig economy* termasuk aplikasi *ride-hailing*, aplikasi pengiriman makanan, dan aplikasi yang membantu menemukan akomodasi sementara.

Terlepas dari popularitasnya, pekerja *gig* sering mengalami kondisi kerja yang rentan, dengan tunjangan yang rendah atau bahkan tidak ada sama sekali dan remunerasi rendah karena mereka tidak dianggap sebagai karyawan perusahaan. Belakangan ini, skema tersebut menjadi sorotan karena membangun kontrak kemitraan yang tidak adil dan tidak diatur.³⁸

PENURUNAN JUMLAH LOWONGAN PEKERJAAN TETAP

Salah satu ciri *gig economy* adalah kontrak jangka pendek atau sesi/harian. Penggunaan kontrak semacam ini berpotensi meningkat seiring dengan penurunan jumlah pekerjaan permanen, sebagaimana telah diantisipasi. Hal ini membawa peningkatan permintaan yang signifikan untuk peluang kerja jangka pendek dengan mekanisme seperti kontrak nol jam dan sesi serta perjanjian kontraktor individu.

MENINGKATNYA PERSAINGAN PASAR TENAGA KERJA

Dinamika pasar tenaga kerja yang berubah berpotensi meningkatkan persaingan di kalangan pekerja. Meskipun situasi ini dapat bermanfaat bagi UMKM, pekerja akan ditempatkan pada posisi yang sulit, dan semakin banyak pekerja dalam *gig economy* yang bersedia bekerja di pasar informal atau dalam kondisi kontrak yang rentan.³⁹ Selain itu, pekerja yang memilih keluar dapat beralih ke sektor UMKM dengan menciptakan usaha sendiri, yang berpotensi meningkatkan persaingan antar UMKM.

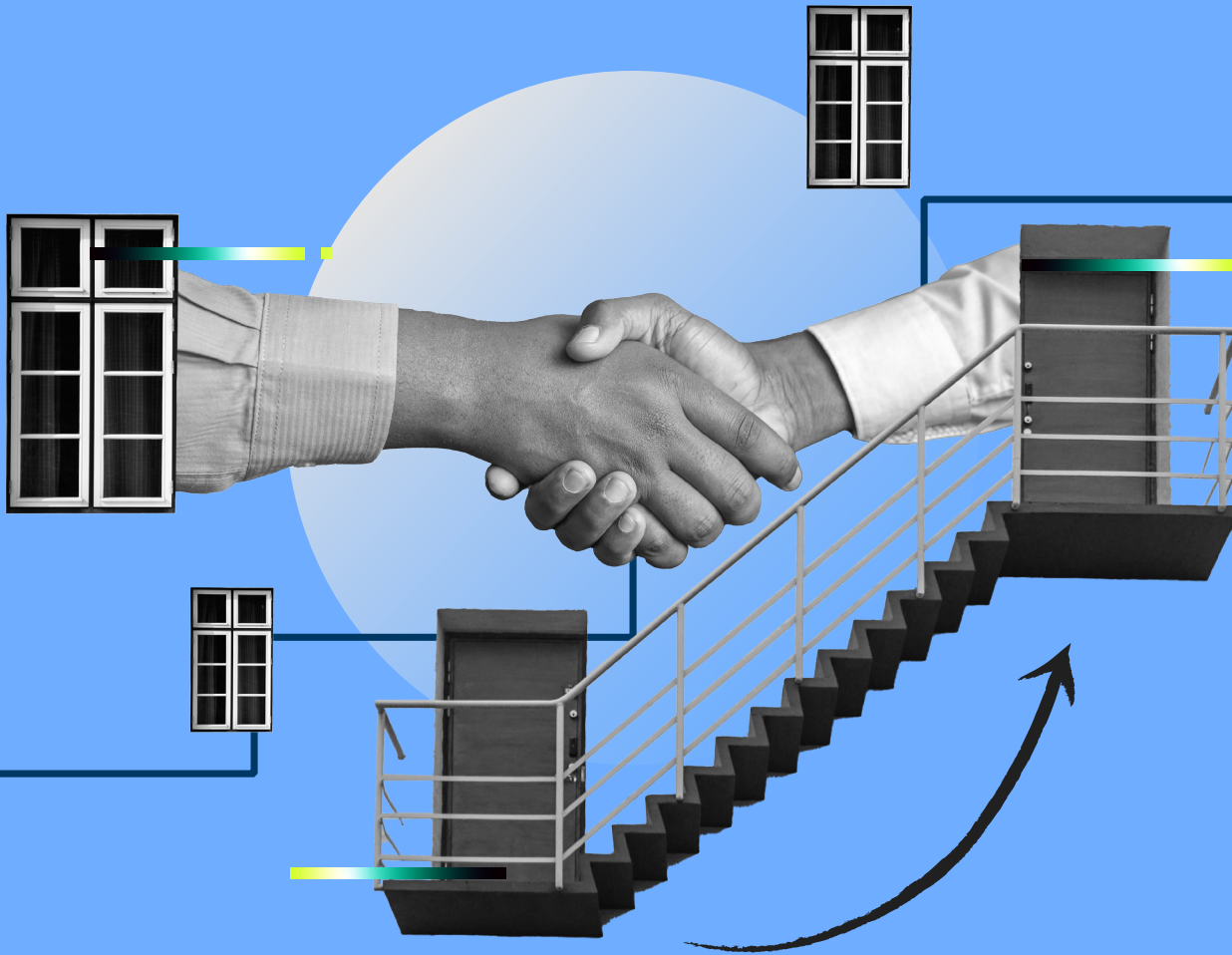
PERBEDAAN PREFERENSI GENERASI DALAM ANGKATAN KERJA

Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan pergeseran pola karir di kalangan pekerja yang lebih muda. Penurunan peluang kerja permanen telah dibarengi dengan tren perubahan global yang lebih cepat dan lebih sering. Oleh karena itu, generasi muda cenderung berganti pekerjaan, dan bahkan profesi, beberapa kali dalam rentang satu dekade. Hal ini dapat menimbulkan tantangan retensi staf bagi UMKM, terutama perusahaan kecil yang modelnya tidak siap untuk pergantian personel yang konstan.

IMPLIKASI DI MASA DEPAN

Menata ulang pasar tenaga kerja untuk era digital

Gig economy semakin menjadi norma di era digital. Untuk menjamin kelangsungan hidup mereka di masa depan, langkah-langkah untuk melindungi para pekerja dalam *gig economy* harus dilakukan. Hak, kontrak, dan perlindungan yang adil bagi pekerja *gig economy* akan memungkinkan mereka untuk berkontribusi yang lebih besar kepada UMKM, menghasilkan peningkatan produksi dan nilai bagi organisasi. Selain itu, UMKM yang memperlakukan pekerja *gig economy* secara adil dan menghormati hak-hak mereka akan membangun reputasi yang lebih baik di mata pelanggan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kelangsungan hidup pasar mereka. Di masa depan, menyediakan pendapatan dasar universal dan cakupan kesehatan universal dapat menjadi pilihan untuk mendukung tenaga kerja informal dan *gig economy* di era digital.



POTENSI LANGKAH SELANJUTNYA UNTUK *STRATEGIC FORESIGHT*

POTENSI LANGKAH SELANJUTNYA UNTUK STRATEGIC FORESIGHT

Proyek *horizon scanning* ini menawarkan nilai tambah penerapan *strategic foresight* dalam konteks pemerintahan Indonesia dan bagaimana proses ini dapat direplikasi di berbagai unit di Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian/lembaga lain di seluruh Indonesia. Bagian ini menguraikan sejumlah opsi tindak lanjut untuk mengembangkan dan mengawal temuan-temuan tersebut agar dapat dimasukkan ke dalam proses perencanaan kebijakan Kementerian PPN/Bappenas, khususnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nasional (RPJMN dan RPJPN).

Perlu dicatat bahwa, meski *strategic foresight* dapat membantu meningkatkan tata kelola antisipatif, ia bukanlah satu solusi untuk semua masalah. Menyesuaikan prosesnya dengan kebutuhan di tiap konteks merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan.

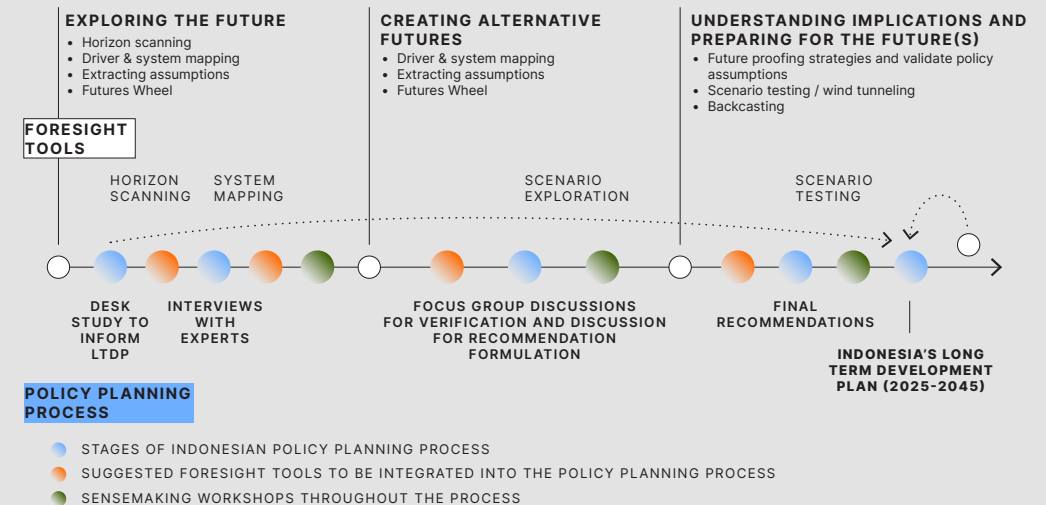
FASE PROSES STRATEGIC FORESIGHT

Proses *strategic foresight* pada umumnya terdiri dari tiga fase:

1. **mengeksplorasi** lingkungan masa depan untuk memahami isu-isu dan pendorong perubahan yang muncul;
2. **merumuskan** berbagai alternatif masa depan; dan
3. **memahami** implikasi dari skenario masa depan yang mungkin terjadi.

Ada berbagai macam alat dan metode *foresight* yang dapat diterapkan pada masing-masing fase tersebut.

PHASES OF A FORESIGHT JOURNEY



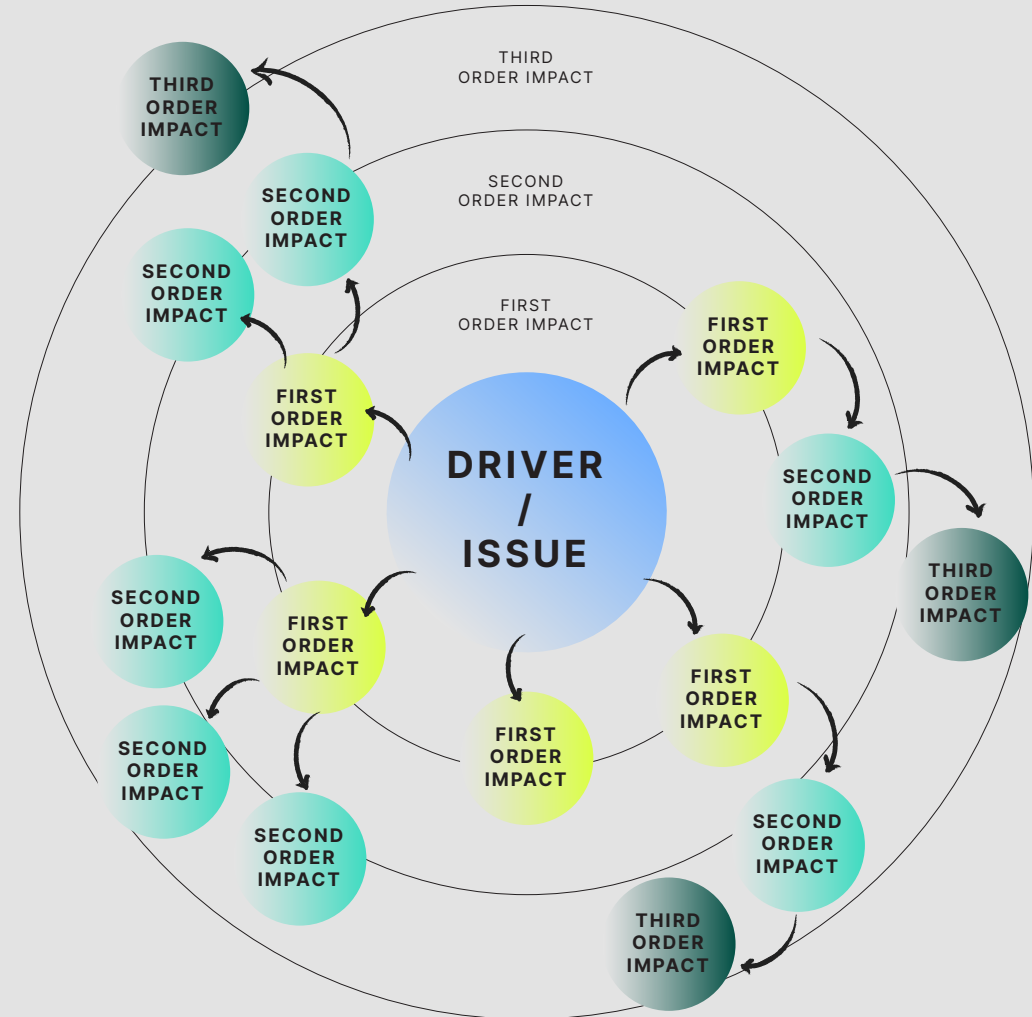
FASE I. MENGEKSPLORASI MASA DEPAN

Mengeksplorasi masa depan adalah titik awal dari setiap proses *strategic foresight*, yang dapat diintegrasikan ke dalam awal proses pembuatan kebijakan. Pada fase ini, pembuat kebijakan akan mengidentifikasi dan menganalisis pendorong dan isu-isu utama, serta ketidakpastian yang akan berdampak di masa depan. Proses ini mendukung pembuat kebijakan dalam memperluas wawasan mereka untuk berpikir di luar isu-isu terkini yang dapat ditangani dalam kebijakan mereka.

Horizon scanning mengeksplorasi lingkungan masa depan dan berfungsi untuk menetapkan agenda, terutama selama fase awal rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), karena melengkapi studi pustaka dan wawancara ahli. Sepanjang proses perencanaan kebijakan, *horizon scanning* yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan deteksi sinyal antisipatif dan berfungsi sebagai “sistem peringatan dini”. Melalui serangkaian **lokakarya penalaran atau sensemaking**, pembuat kebijakan dapat mulai mengeksplorasi bagaimana sinyal-sinyal yang diidentifikasi dapat menghasilkan kondisi kontekstual yang berbeda, yang mempengaruhi kebijakan dan strategi mereka saat ini dan di masa depan. Sebagai langkah selanjutnya, **pemetaan faktor pendorong dan sistem** adalah cara untuk memperoleh gambaran makro dari sistem dengan memprioritaskan dan memetakan berbagai *driver* atau pendorong perubahan yang teridentifikasi. Pemetaan adalah metode yang sangat berguna untuk menyoroti masalah yang paling kritis dan memahami kompleksitas dan keterkaitannya.

Futures Wheel (lihat Gambar hal 32) adalah kegiatan sederhana dan produktif untuk melibatkan para pembuat kebijakan dalam sebuah lokakarya pemikiran masa depan, dan dapat digunakan untuk memahami sinyal yang telah diidentifikasi melalui *horizon scanning*. Kegiatan ini berfokus pada pendorong, isu, atau peristiwa spesifik yang membutuhkan lebih banyak pertimbangan sehubungan dengan potensi implikasi turunan. *Futures Wheel* dapat diintegrasikan ke dalam RPJP dan digunakan dalam sesi-sesi FGD untuk mengeksplorasi risiko dan peluang, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses perencanaan kebijakan.

FUTURE WHEEL_

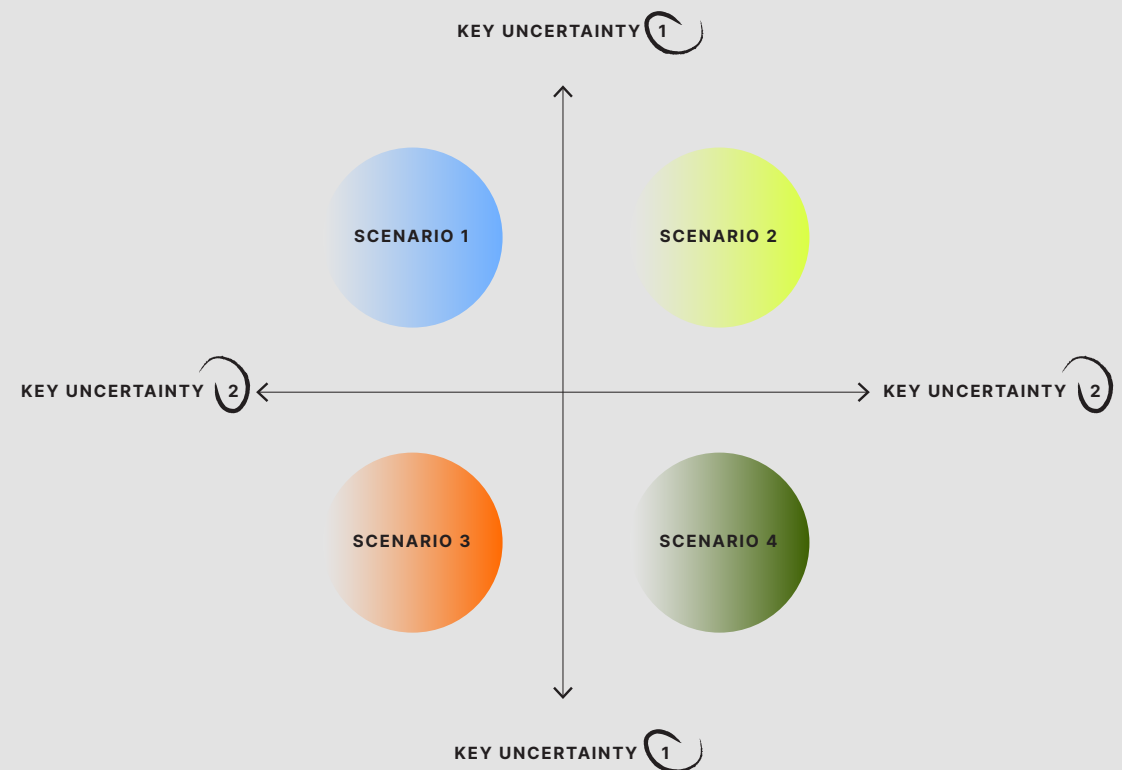


SCENARIO MATRIX_

TAHAP II. MERUMUSKAN ALTERNATIF MASA DEPAN

Merumuskan alternatif masa depan adalah fase kedua dari proses *strategic foresight*. Fase ini mendukung pembuat kebijakan dalam mengeksplorasi potensi masa depan yang mungkin muncul. Ketika menyusun rencana pembangunan nasional Indonesia, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan bagaimana masa depan UMKM dapat berkembang selama 10-20 tahun ke depan. Mengidentifikasi dan merumuskan berbagai alternatif masa depan yang mungkin terjadi melalui **kegiatan penyusunan skenario partisipatif** akan mendukung upaya ini. Skenario adalah narasi spekulatif yang membantu untuk mengeksplorasi berbagai macam potensi masa depan yang mungkin terjadi. Mengidentifikasi skenario-skenario ini memungkinkan kita untuk mempersiapkan tidak hanya untuk satu, melainkan berbagai kemungkinan skenario yang akan terjadi. Skenario disusun berdasarkan pendorong perubahan yang diidentifikasi melalui proses *horizon scanning*, sebagaimana disajikan dalam laporan ini.

Metode-metode utama berikut dapat membantu pembuat kebijakan menantang asumsi kebijakan mereka saat ini dan mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan strategi dapat berkembang di masa depan:





- Metode yang sering digunakan untuk mengembangkan skenario adalah **matriks 2×2** atau metode “identifikasi ketidakpastian utama” (lihat Gambar 33). Dua pendorong perubahan, yang dianggap punya peran yang paling penting di masa depan, dipilih dan ditempatkan pada masing-masing sumbu matriks 2×2, menghasilkan empat skenario yang kontras. Selanjutnya, pertanyaan penting yang perlu dijawab pembuat kebijakan adalah: apa dua kekuatan pendorong utama yang mempengaruhi masa depan UMKM di Indonesia selama 10-20 tahun ke depan? Dengan mempertimbangkan dua hasil yang berbeda untuk setiap faktor pendorong, kita dapat memastikan konvergensi antara berbagai potensi arah yang berkembang.
- Metode alternatif untuk mengembangkan skenario adalah **metode arketipe**, yang mengeksplorasi empat lintasan masa depan (Pertumbuhan berkelanjutan, Keruntuhan, Transformasi, dan Disiplin). Metode ini mudah diterapkan dan merupakan cara yang baik dan cepat untuk menciptakan gambaran masa depan yang mungkin terjadi, meski skenario yang dihasilkan kurang komprehensif jika dibandingkan metode 2×2.

Ketika serangkaian skenario disusun, skenario-skenario tersebut dapat menjadi acuan bersama untuk berdiskusi tentang masa depan dengan cara yang terstruktur dan sistematis, tidak hanya bagi para perencana kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas, tetapi juga untuk audiens yang lebih luas di K/L lain dan di luarnya. Skenario-skenario ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan strategi yang dibuat, baik saat ini dan di masa depan, akan tetap relevan (lihat bagian “memahami implikasinya” di bawah).

Menetapkan Visi adalah metode yang ampuh yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk menciptakan masa depan yang diinginkan dan memahami langkahlangkah apa yang diperlukan (strategi, kebijakan, dll.) untuk mencapainya. Metode ini bertolak dari eksplorasi dan pendalaman berbagai skenario yang mungkin, menuju transformasi masa depan. Dengan menetapkan visi, kita menghasilkan konsensus dan membantu menguraikan strategi tentang bagaimana merencanakan visi bersama untuk masa depan. Menetapkan visi dapat dilakukan pada tahap akhir penyusunan proses RPJP—setelah ada pemahaman bersama yang jelas tentang lingkungan masa depan dan berbagai skenario masa depan yang mungkin terjadi—untuk menghasilkan konsensus di antara pembuat kebijakan senior tentang versi masa depan yang mana yang perlu diupayakan. Memasukkan suara publik dan para ahli dalam fase penciptaan masa depan alternatif ini akan secara signifikan meningkatkan kredibilitas dan kekuatan skenario dan visi.

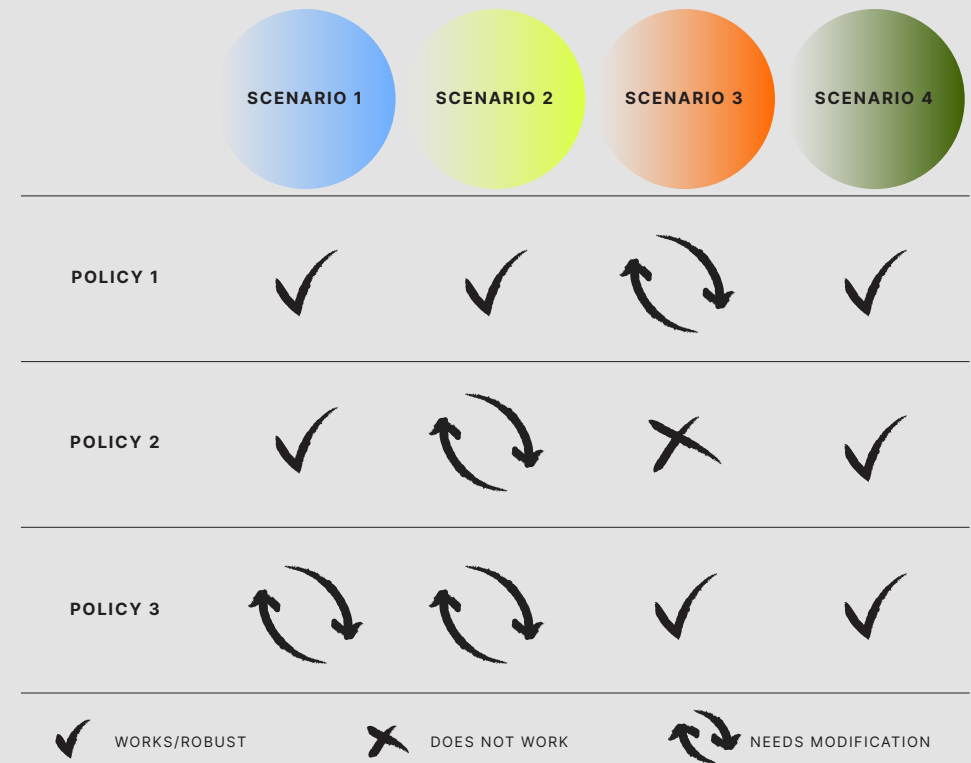
WIND TUNNELLING_

TAHAP III. MEMAHAMI IMPLIKASI DARI VERSI MASA DEPAN YANG MUNGKIN TERJADI

Memahami implikasi dari versi masa depan yang mungkin terjadi adalah fase ketiga dari proses *strategic foresight*. Khususnya dalam proyek ini, fase ini dapat secara efektif mendukung Kementerian PPN/Bappenas dalam memahami implikasi masa depan bagi UMKM, dan membantu mengeksplorasi opsi-opsi kebijakan strategis yang akan dimiliki Kementerian PPN/Bappenas. Selama fase ini, pembuat kebijakan dapat terlibat dalam serangkaian dialog masa depan atau **lokakarya penalaran skenario**.

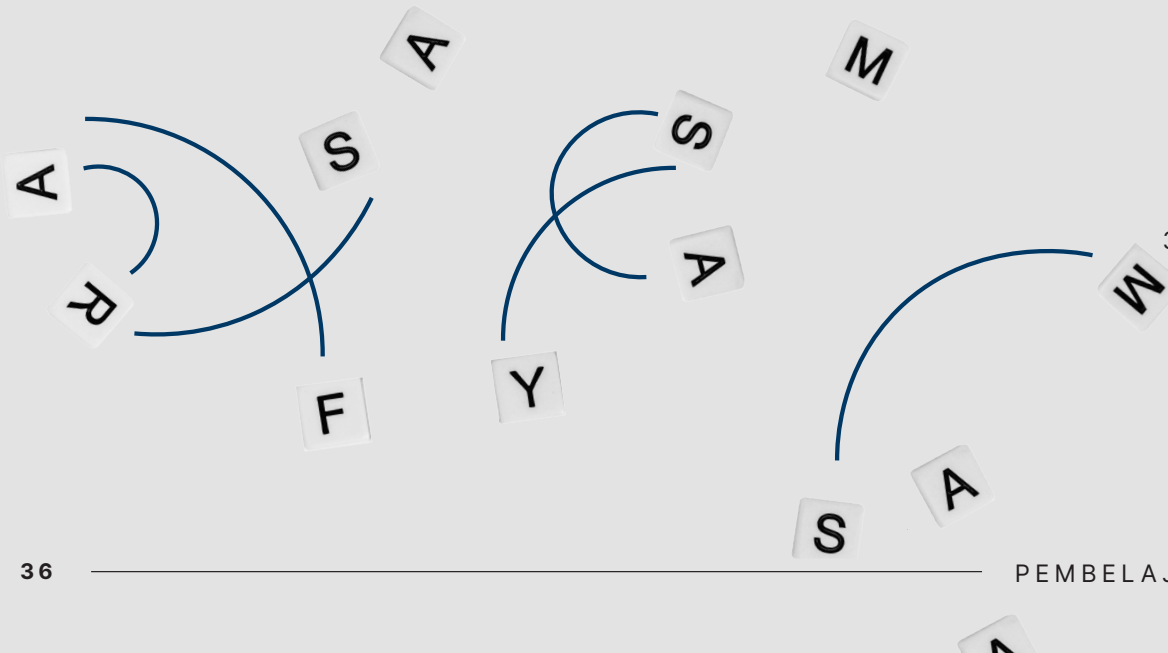
Salah satu metode yang digunakan untuk mendukung tahap ini adalah **Wind tunneling** (lihat Gambar hal 35), sebuah proses terstruktur yang digunakan untuk menguji kebijakan, strategi, dan asumsi saat ini terhadap berbagai skenario alternatif. Proses ini juga dapat menguji ketahanan kebijakan yang diusulkan dalam RPJP.

Backcasting juga dilakukan berdasarkan skenario yang telah diidentifikasi, dan menghasilkan pemahaman bersama tentang apa yang perlu terjadi agar masa depan yang diinginkan terjadi. Hal ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi kemungkinan jalur menuju transformasi, yang didasarkan pada pemikiran jangka panjang. Hasil yang dapat dihasilkan dari kegiatan *backcasting* dapat berupa serangkaian indikator yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk memantau skenario yang muncul.



PEMBELAJARAN UTAMA DARI KEGIATAN STRATEGIC FORESIGHT

Proyek *horizon scanning* ini merupakan proses berulang dan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan. Sepanjang proses ini, kami memperoleh pembelajaran berikut:



1. **Kontekstualisasi adalah kunci.** Untuk dapat menerapkan segala bentuk kegiatan *strategic foresight* secara efektif, kita perlu mempertimbangkan konteks kebijakan, politik, budaya, dan sosial-ekonomi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Misalnya, melakukan *horizon scanning* membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks lingkungan yang lebih luas (dalam hal ini lanskap UMKM di Indonesia), agar dapat membayangkan jenis perubahan yang mungkin terjadi. Selain itu, kita membutuhkan pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat dalam ekosistem UMKM, dan cara pemangku kepentingan berpikir tentang masa depan.
2. **Strategic foresight membantu menantang asumsi kita tentang masa depan.** Asumsi, baik eksplisit maupun implisit, membentuk dialog dan tindakan kebijakan kita saat ini. Proses *horizon scanning* menuntut kita untuk memikirkan kembali beberapa asumsi yang dimiliki pembuat kebijakan tentang peran mereka dalam mendukung UMKM. Misalnya, asumsi bahwa standardisasi, sertifikasi, dan formalisasi hanya dapat ditempuh melalui otoritas publik, atau asumsi bahwa negara hanya dapat memberikan perlindungan sosial kepada pekerja formal dan bukan pekerja informal. Pelaksanaan *strategic foresight* lebih lanjut akan memungkinkan pembuat kebijakan untuk meningkatkan literasi masa depan mereka dan memahami bagaimana menggunakan masa depan di masa sekarang, sehingga mengembangkan asumsi baru tentang apa yang relevan untuk UMKM Indonesia hari ini dan nanti. Misalnya, pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan opsi untuk menggunakan aktor non-negara untuk sertifikasi tertentu atau kegiatan penilaian pasar, dan memikirkan bagaimana hal itu dapat memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja di *gig economy*.
3. **Strategic foresight meningkatkan pemahaman kita tentang keterkaitan isu-isu dan perlunya pendekatan lintas sektoral.** Analisis *horizon scanning* ini mengidentifikasi keterkaitan signifikan antara faktor politik, sosial ekonomi, dan lingkungan teknologi. Dengan demikian, terdapat keterkaitan dan saling ketergantungan antara isu-isu yang muncul yang



akan mempengaruhi UMKM di masa depan. Misalnya, perubahan iklim dapat secara tidak proporsional mempengaruhi masyarakat pedesaan yang paling miskin dan paling terpinggirkan (termasuk UMKM), yang berimplikasi pada kemiskinan, ketimpangan, dan migrasi. Untuk mengatasi masalah yang muncul dari perspektif holistik, mengakui dan memahami bagaimana mereka terhubung dan mempengaruhi satu sama lain adalah langkah penting bagi pembuat kebijakan. Untuk melakukannya diperlukan kemauan untuk mengatasi sekat-sekat yang memisahkan dalam proses pembuatan kebijakan. *Strategic foresight* dapat membantu melampaui struktur organisasi dengan menyediakan ruang untuk diskusi berkelanjutan tentang masa depan.

4. ***Strategic foresight* memerlukan perubahan pola pikir.** *Strategic foresight* adalah pendekatan ampuh yang dapat mendobrak batas-batas pemikiran dan meningkatkan kesiapan kita untuk masa depan. Pendekatan ini juga memberdayakan organisasi agar mampu melihat masa depan sebagai sesuatu yang dapat mereka pengaruhi, mengambil kendali dan mendorong aksi-aksi nyata hari ini yang akan berdampak pada masa depan yang diinginkan.
5. **Sangat penting untuk melibatkan perspektif dari berbagai kelompok dalam dialog partisipatif tentang masa depan.** Melibatkan perwakilan pemuda dan UMKM dari berbagai daerah dapat membantu meningkatkan kontekstualisasi hasil kegiatan *horizon scanning*. Sebagai bagian dari kegiatan *horizon scanning*, kami melibatkan pemuda dari organisasi masyarakat sipil (OMS), komunitas yang mengadvokasi inklusivitas bagi orang dengan disabilitas, dan kelompok aktivis lingkungan. Pengalaman tersebut memberikan perspektif yang unik, membantu memahami bagaimana berbagai pendorong yang telah diidentifikasi akan terwujud dalam praktiknya, dan mendorong diskusi tentang kebutuhan potensial UMKM yang dapat muncul di masa depan.

UNDANGAN UNTUK BERDIALOG TENTANG MASA DEPAN

Di masa perubahan yang cepat dan penuh ketidakpastian, pemerintah perlu bersiap untuk hal-hal yang tidak terduga. Lebih penting lagi, kita perlu menjauh dari praktik praktik *business as usual* dan mendobrak sekat-sekat pemisah dalam proses pembuatan kebijakan. Mengatasi masalah kompleks memerlukan pemahaman menyeluruh tentang faktor pendorong dalam suatu isu, yang dapat dibantu oleh pendekatan *strategic foresight*.

Strategic foresight tidak memprediksi apa yang akan terjadi, melainkan memungkinkan kita untuk mempersiapkan masa depan yang mungkin terjadi. Melalui kegiatan *horizon scanning* ini, kami mengidentifikasi berbagai pendorong dan sinyal utama yang dapat berdampak pada masa depan UMKM Indonesia, serta implikasi masa depan dari masing-masing pendorong dan sinyal tersebut. Kegiatan *horizon scanning* juga mengungkapkan keterkaitan yang signifikan antara bidang politik, sosial ekonomi, dan teknologi-lingkungan.

Berdasarkan pendorong dan sinyal yang diidentifikasi, kami mengundang berbagai pihak termasuk instansi pemerintah, akademisi, praktisi UMKM, dan masyarakat umum untuk berdialog tentang masa depan UMKM di Indonesia. Untuk memulai dialog, kami bertanya: Apa makna dan implikasi dari tren-tren yang membentuk masa depan UMKM Indonesia? Apa saja yang perlu kita perhatikan berdasarkan pendorong dan sinyal yang diidentifikasi?





GLOSARIUM

KERJA PERAWATAN (CARE WORK)_

Mengacu pada aktivitas kerja yang melibatkan perawatan orang lain, termasuk anak-anak, orang dewasa, atau lansia. Kerja perawatan mencakup aktivitas langsung (memberi makan bayi atau merawat pasangan yang sakit) atau tidak langsung (memasak dan membersihkan rumah).

EKONOMI Sirkular_

Model produksi dan konsumsi yang dijalankan dengan tujuan agar produk, bahan, dan jasa tetap dalam lingkaran perekonomian selama mungkin. Model ini melibatkan proses berbagi, menyewakan, menggunakan kembali, memperbaiki, memperbarukan, dan mendaur ulang.

PERUBAHAN IKLIM_

Pergeseran jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Meski pergeseran terjadi secara alami, aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, telah menjadi kontributor utama perubahan iklim sejak tahun 1800-an. Pergeseran ini terlihat melalui perubahan pola air, naiknya permukaan air laut, dan peristiwa cuaca ekstrim, serta memengaruhi negara-negara di seluruh dunia serta perekonomian nasional.

KESENJANGAN Digital_

Kesenjangan antara individu, rumah tangga, usaha, dan wilayah geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda sehubungan dengan peluang mereka untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penggunaan internet untuk berbagai macam kegiatan.

PENDORONG PERUBAHAN_

Kekuatan dan dorongan perubahan yang dapat membentuk suatu lanskap (sistem).

ECOTAX_

Pajak yang dimaksudkan untuk berkontribusi pada dampak lingkungan yang positif. Biasanya termasuk pajak energi, pajak transportasi, dan pajak atas polusi dan sumber daya. Ecotax juga umumnya dikenal sebagai pajak lingkungan.

INVESTASI LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA (ESG)_

Strategi investasi yang memperhitungkan kriteria finansial dan non-finansial dalam keputusan investasi. Kriteria non-finansial biasanya terkait dengan dampak perusahaan dalam membantu mengatasi tantangan sosial yang mendesak, termasuk masalah lingkungan dan sosial. ESG juga mempertimbangkan kebijakan tempat kerja perusahaan.

PRODUK ETIS_

Produk yang, di sepanjang setiap titik rantai pasokan, tidak menyebabkan bahaya bagi lingkungan dan penggunanya.

INDUSTRI EKSTRAKTIF_

Proses yang melibatkan ekstraksi bahan mentah, termasuk minyak, logam, mineral, dan agregat, dari bumi. Prosesnya juga mencakup pengeboran dan pemompaan, penggalian, dan penambangan..

GIG ECONOMY_

Cara kerja yang melibatkan pertukaran tenaga kerja dengan uang antara individu atau perusahaan melalui platform digital yang secara aktif memfasilitasi pencocokan antara penyedia dan pelanggan dalam jangka pendek dan pembayaran berdasarkan tugas

EKONOMI HIJAU_

Ekonomi Hijau menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Ekonomi Hijau bersifat rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial (UNEP).

EKONOMI HALAL_

Sektor dengan produk dan layanan inti berdasarkan hukum Islam. Prinsip inti dari ekonomi halal adalah memastikan bahwa semua transaksi didasarkan pada aset atau proyek nyata.

HORIZON SCANNING_

Proses terstruktur yang mengidentifikasi potensi sinyal-sinyal perubahan dan isu-isu yang muncul yang bisa sangat mengubah lanskap masa depan.

MEGATREN_

Tren yang memiliki efek pada skala global atau besar.

PESTLE_

Singkatan dari: politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum dan lingkungan. PESTLE adalah alat analisis untuk membantu mengeksplorasi lingkungan yang luas.

SKENARIO_

Gambaran lingkungan dan situasi masa

depan yang mungkin terjadi.

SINYAL PERUBAHAN_

Indikator pertama yang menandakan bahwa perubahan mungkin sedang berlangsung. Kadangkadang disebut sebagai sinyal awal atau sinyal lemah. Sinyal dapat menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu ketika risiko atau peluang kejadian semakin terlihat.

STRATEGIC FORESIGHT_

Strategic Foresight adalah pendekatan yang terorganisir dan sistematis untuk memikirkan masa depan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Strategic Foresight membantu kita menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas yang semakin meningkat mengenai masa depan.

TREN_

Tren adalah kecenderungan umum atau sesuatu yang secara bertahap terjadi; arah ke mana perubahan tampak menuju.

KEWAJIBAN LAYANAN UNIVERSAL_

Kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke layanan telekomunikasi dan informasi dasar dengan harga yang terjangkau dan wajar, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan, terpencil, tertinggal, dan terluar .

KONTRAK TANPA JAM KERJA_

Pekerjaan yang didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di mana pengusaha tidak berkewajiban untuk menentukan jumlah jam kerja minimum. Berdasarkan perjanjian ini, karyawan hanya dibayar ketika benar-benar bekerja, meskipun diharuskan berada di lokasi dan tersedia untuk bekerja

FAKTOR PENDORONG SEKUNDER YANG TERPILIH

Proses horizon scanning menghasilkan identifikasi 112 sinyal. Sinyal-sinyal ini kemudian diklasifikasikan sebagai 15 pendorong utama perubahan, yang kemudian dipersempit menjadi lima pendorong utama. Bagian berikut mengidentifikasi pendorong dan sinyal sekunder terpilih yang juga dapat membentuk masa depan UMKM di Indonesia.



RANAH EKONOMI DAN SOSIAL

MENINGKATNYA KESENJANGAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

- **Kurangnya sumber daya manusia di sektor pertanian.** Dengan terbatasnya peluang di daerah pedesaan, kaum muda akan terdorong untuk bermigrasi ke kota, sehingga menciptakan kesenjangan dalam tenaga kerja pedesaan.

- **Memburuknya pembangunan sosial di wilayah pedesaan.** Migrasi kaum muda akan berdampak pada wilayah pedesaan dengan meningkatnya populasi lansia di desa-desa, yang akan kesulitan mengejar kemajuan sosioekonomi.

- **Persaingan yang tinggi di antara kaum muda untuk mendapatkan kesempatan kerja di kota.** Kaum muda akan lebih sulit menemukan pilihan pekerjaan dan mayoritas mungkin beralih ke ekonomi informal.

ANAH LINGKUNGAN DAN TEKNOLOGI

DUA SISI PENGAWASAN SIBER

- **Pengawasan digital untuk melawan misinformasi.** Pengawasan digital dapat digunakan dengan tujuan melawan misinformasi dan meningkatkan keamanan siber, sehingga menciptakan lingkungan digital yang lebih aman yang dapat meningkatkan ketahanan dan adopsi teknologi digital yang lebih luas oleh UMKM.
- **Meningkatnya ancaman terhadap data pribadi dan privasi.** Peningkatan pengawasan siber dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kepercayaan digital dan ancaman terhadap data pribadi dan privasi, membatasi kebebasan sipil dan mendorong praktik-praktik tidak demokratis yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis.



RANAH POLITIK DAN HUKUM

KETAHANAN DAN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGATASI KETIDAKPASTIAN GEOPOLITIK

- **Konflik dan perang yang berkepanjangan menimbulkan dampak turunan negatif bagi perekonomian domestik dan kawasan.** Selama beberapa tahun terakhir, perang dan konflik di seluruh dunia telah menyebabkan ketidakpastian geopolitik dan dampak ekonomi yang berjenjang di banyak negara.
- **Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global.** Indonesia berhasil meraih manfaat dari hubungan yang baik dengan Tiongkok, termasuk memanfaatkan peluang ekonomi yang sangat besar, dengan peran Tiongkok sebagai mitra pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan transfer pengetahuan.
- **Munculnya aktor-aktor non-negara yang mempengaruhi dinamika geopolitik.** Lingkungan politik global yang baru tidak hanya dipengaruhi oleh aktor-aktor negara melalui kebijakan luar negeri dan domestik mereka, tetapi juga oleh aktor nonnegara seperti entitas bisnis dan masyarakat sipil yang semakin punya andil dalam membentuk dinamika geopolitik.

MENINGKATKAN AKSES UNTUK EKSPANSI BISNIS MELALUI MEKANISME-MEKANISME BARU

- **Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai jaminan pinjaman.** Penerimaan HKI sebagai bentuk jaminan akan memberikan mekanisme alternatif bagi UMKM baru untuk memperoleh pendanaan melalui pinjaman bank.
- **Akses ke e-katalog dan e-procurement.** Meskipun platform-platform ini menawarkan berbagai peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka di sektor publik, platform ini mungkin lebih cocok untuk perusahaan menengah dan besar yang memiliki kemampuan digital yang lebih maju.

UCAPAN TERIMA KASIH

Horizon Scanning untuk masa depan UMKM di Indonesia adalah sebuah proyek kolaborasi antara kantor United Nations Global Pulse di Finlandia (Pulse Lab Finlandia), Jakarta (Pulse Lab Jakarta), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI).

Tim inti proyek ini beranggotakan: Mariska Yasrie (Kementerian PPN/Bappenas RI), Harry Lesmana (Kementerian PPN/Bappenas RI), MayongFirdaus (Kementerian PPN/Bappenas RI), Muhammad Farhan Perdana (Kementerian PPN/Bappenas RI), Yusuf Hafizh Inzaghi (Kementerian PPN/Bappenas RI), Dini Ajani Putri (Kementerian PPN/Bappenas RI), Ghefiran Abdurrahimdzan (Kementerian PPN/Bappenas RI), Syarifah Muslimat (Kementerian PPN/Bappenas RI), Desi Vicianna (Pulse Lab Jakarta), Aaron Situmorang (Pulse Lab Jakarta), Siti Rizqi Ashfina Rahmaddina (Pulse Lab Jakarta), Angga Gumilar (Pulse Lab Jakarta), Maesy Angelina (Pulse Lab Jakarta), Vitasari Anggraeni (Pulse Lab Jakarta), dan Kiana Puti Aisha (Pulse Lab Jakarta).

Dukungan metodologis dari Pulse Lab Finlandia: Minke Meijnders, Mariú Abritta Moro, Tiina Neuvonen, dan Rohit Talwar.

Kami juga berterima kasih kepada Ahmad Dading Gunadi, Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas Indonesia, yang telah memungkinkan dan mendukung proyek *strategic foresight* ini sejak tahap konsepsi hingga selesai.

CATATAN AKHIR

¹ Ditjen Anggaran Kemenkeu, "Dukungan Program PEN Pembangkit UMKM", 10 April 2022, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/dukungan-program-pen-bangkitkanumkm>.

² World Economic Forum, "How digitalization is accelerating the growth of MSMEs in Indonesia," 17 Mei 2022, <https://www.weforum.org/agenda/2022/05/digitalizationgrowth-indonesia-msmes/>.

³ Bappenas, Indonesia 2045: [Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur](#) (Bappenas, 2019).

⁴ In particular sustainable development goals 8, 9 and 10: decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, and reduced inequalities.

⁵ S. Tarigan and Y. Kristanto, "Assessment of Water Security in Indonesia Considering Future Trends in Land Use Change and

[Climate Change](#)," terbit *Water Security in Asia*, ed. Andrey G. Kostianoy (Switzerland: Springer Nature, 2021), 167-177.

⁶ Basten Gokkon, "Study: Climate impacts to disproportionately hurt tropical fishers, farmers," *Mongabay*, 15 Juli 2022, <https://news.mongabay.com/2022/07/study-climate-impactsto-disproportionately-hurt-tropicalfishers-farmers/>.

⁷ Voegelé, Juergen, "Millions on the move: What climate change could mean for internal migration" World Bank blogs, 1 November 2021, <https://blogs.worldbank.org/voices/millionsmove-what-climate-change-couldmean-internal-migration>.

⁸ Natasha Gilbert, "Climate change will force new animal encounters – and boost viral outbreaks," 22 April 2022, <https://www.nature.com/articles/d41586-022-01198-w>.

⁹ European Parliament News, Circular economy: definition, importance, and benefits," <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definitionimportance-and-benefits>.

¹⁰ United Nations Environmental Program, "Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication – A Synthesis for Policy Makers," UNEP 2011, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/126GER_synthesis_en.pdf.

¹¹ Jakarta Globe, "Indonesia to impose carbon tax in April 2022, starting with coal power plants," 8 Oktober 2021, <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-to-impose-carbon-tax-in-april2022-starting-with-coal-power-plants>.

¹² Jakarta Globe, "Masyarakat Indonesia menyambut baik kebijakan kantong plastik berbayar," 22 Februari 2016, <https://jakartaglobe.id/news/indonesians-welcome-pay-plasticbag-policy/>.

¹³ London School of Economics, "The distributional effects on a carbon tax: the role of income inequality," 9 September 2020, <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/the-distributional-effects-of-acarbon-tax-the-role-of-incomeinequality/>.

¹⁴ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), *Anticipatory action: changing the way we manage disasters*, 2021, Rome: FAO.

¹⁵ IDN Financials, "IK-CEPA becomes new opportunity for Indonesia-South Korea's economic growth, trade and investment," June 23, 2022, <https://www.idnfinancials.com/news/43464/ik-cepa-opportunity-indonesiasouth-korea-economic-growth-tradeinvestment>.

¹⁶ Jakarta Post, "Keeping up with global market bodes well for SMEs," March 23, 2022, <https://www.thejakartapost.com/adv/2022/03/23/keeping-up-with-globalmarket-bodes-well-for-smes.html>.

¹⁷ Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents and Translation, "Indonesia will be world's 4th largest economy by 2045: President Jokowi says," March 27, 2017, <https://setkab.go.id/en/indonesia-willbe-worlds-4th-largest-economy-by2045-president-jokowi-says/>.

¹⁸ Antara News, "Indonesia, Canada agree to boost economic cooperation," 11 April, 2022, <https://en.antaranews.com/news/224361/indonesia-canada-agree-to-boosteconomic-cooperation>.

- ¹⁹ TNP2K, [The situation of the elderly in Indonesia and access to social protection programs: secondary data analysis](#), 2020 (Jakarta, Indonesia: TNP2K).
- ²⁰ World Economic Forum, "40% of all projected job opportunities will be created in this sector. And it's not technology," 28 Mei, 2021, <https://www.weforum.org/agenda/2021/05/care-economy-emerging-jobopportunities/>.
- ²¹ Dinar Standard, State of the Global Islamic Economy Report: unlocking opportunity (Dubai: Dinar Standard, 2022).
- ²² Forbes, "Consumers demand sustainable products and shopping formats," 11 Maret, 2022, <https://www.forbes.com/sites/gregpetro/2022/03/11/consumers-demand-sustainableproducts-and-shoppingformats/?sh=313bddd96a06>.
- ²³ British Council, "Social enterprise," <https://www.britishcouncil.org/society/social-enterprise>.
- ²⁴ British Council Indonesia and the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), [Developing an inclusive and creative economy: the state of social enterprise in Indonesia](#) (Jakarta, 2018).
- ²⁵ Tulus Tambunan, "[MSME and access to financing in a developing economy: the Indonesian experience](#)," in Financial Entrepreneurship for Economic Growth in Emerging Nations edited by Atsede Woldie and Brychan Thomas (Hershey, PA: IGI Globa, 2017).
- ²⁶ OECD, Blended Finance, <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainabledevelopment/blended-financeprinciples/#:~:text=Blended%20finance%20is%20the%20strategic,providing%20financial%20returns%20to%20investors>.
- ²⁷ The OECD refers to the digital divide as "the gap between individuals, households, businesses and geographic areas at different socio-economic levels with regard to both their opportunities to access information and communication technologies (ICTs) and to their use of the Internet for a wide variety of activities." Organization for Economic Cooperation and Development, [Understanding the Digital Divide](#) (OECD, 2001).
- ²⁸ Asia Business Law Journal, "Keeping up with latest technologies in Indonesia," 23 Juli, 2019, <https://law.asia/indonesia-keeping-up-latesttechnologies/>.
- ²⁹ Jakarta Post, "Exposed data breaches on the rise in Indonesia," 24 Agustus, 2022, <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/08/24/exposed-databreaches-on-the-rise-in-indonesia.html>.
- ³⁰ Financial Times, "Big tech signs up to Indonesia's strict content law," 21 Juli 2022, <https://www.ft.com/content/6f9eebf5-6025-44b6-8815-9e0ee4096726>.
- ³¹ SSEK Indonesian Legal Consultants, "Indonesia's new personal data protection law," 30 September, 2022, [https://www.ssek.com/blog/indonesias-new-personal-data-protecti onlaw#:~:text=Indonesia%207s%20New%20Personal%20Data%20Protection%20Law&text=\(September%2030%2C%202022\)%20Indonesia%27s, ratified%20by%20President%20Joko%20Widodo](https://www.ssek.com/blog/indonesias-new-personal-data-protecti onlaw#:~:text=Indonesia%207s%20New%20Personal%20Data%20Protection%20Law&text=(September%2030%2C%202022)%20Indonesia%27s, ratified%20by%20President%20Joko%20Widodo).
- ³² The Brookings Institution, "Understanding the impact of automation on workers, jobs, and wages," 19 Januari 2022, <https://www.brookings.edu/blog/upfront/2022/01/19/understanding-theimpact-of-automation-on-workersjobs-and-wages/>.
- ³³ The World Bank, "Beyond unicorns: harnessing digital technologies for inclusion in Indonesia," 29 Juli 2021, <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/beyond-unicorns-harnessing-digitaltechnologies-for-inclusion-inindonesia>.
- ³⁴ Digital Regulation Platform, "Indonesia's universal service obligation fund," 24 September 2020, <https://digitalregulation.org/indonesias-universal-serviceobligation-fund/>.
- ³⁵ Omidyar Network, "Unchecked power: the root of big tech issues," February, 2020, https://omidyar.com/wp-content/uploads/2020/09/Omidyar-Network-POV_Platforms-and-Power_2.7.2020.pdf.
- ³⁶ Department for Business, Energy, and Industrial Strategy, UK, [The characteristics of those in the gig economy](#) (UK, 2018).
- ³⁷ East Asia Forum, "Indonesia's gig economy falling short on decent work standards," 3 Februari 2022, <https://www.eastasiaforum.org/2022/02/03/indonesias-gig-economy-fallingshort-on-decent-work-standards/>.
- ³⁸ Tech in Asia, "Grab, Gojek, others get low score on fair work index in Indonesia: report," 17 Desember 2021, <https://www.techinasia.com/grab-gojek-fail-deliver-fair-pay-gigworkers-indonesia-report>.
- ³⁹ Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada, [Fairwork Indonesia Ratings 2021: Labour Standards in the Gig Economy](#) (Yogyakarta: CfDS UGM, 2021).



CARA MENGUTIP DOKUMEN INI:

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DAN UN GLOBAL PULSE, *'HORIZON SCANNING: MASA DEPAN UMKM DI INDONESIA'*, DESEMBER 2022

UN GLOBAL PULSE © 2022
WWW.UNGLOBALPULSE.ORG/PROJECTS/